

# CARA PANDANG

Inspirasi Terkini!

Edisi Agustus 2025



**BENDERA ONE PIECE  
SIMBOL PERLAWANAN SIMBOLIK  
BUKAN MAKAR**

**KADO PRESIDEN UNTUK GURU  
DAN IKHTIAR TINGKATKAN KOMPETENSI  
DAN KESEJAHTERAAN GURU**



LOISJEANS.ID

DISCOUNT 

UP TO 70%

YEAR

END

*Sale*



# DAFTAR ISI

<u>TAJUK</u>	
DARI JANJI PROKLAMASI KE TANGGUNG JAWAB SEJARAH	5
<u>POLITIK</u>	
DELAPAN PULUH TAHUN MERDEKA: PRABOWO MENEGASKAN ARAH BARU INDONESIA	13
<u>EKONOMI</u>	
RAPBN 2026: ANGGARAN RAKYAT, AGENDA BANGSA	16
<u>HUMANIORA</u>	
BENDERA ONE PIECE SIMBOL PERLAWANAN SIMBOLIK BUKAN MAKAR	20
<u>EDUKASI</u>	
KADO PRESIDEN UNTUK GURU DAN IKHTIAR TINGKATKAN KOMPETENSI DAN KESEJAHTERAAN GURU	28
<u>INTERNASIONAL</u>	
DUKUNGAN EROPA PERCEPAT WUJUDKAN PERDAMAIAN DI PALESTINA	34
PERANG DEMI PERDAMAIAN: IRONI TIMUR TENGAH YANG TERUS TERULANG	40
LUKA BARU DI PERBATASAN THAILAND-KAMBOJA	44
MENGUNCI PERBATASAN EKONOMI: STRATEGI TARIF DONALD TRUMP	47
<u>EDUKASI</u>	
PERSIAPKAN GENERASI UNGGUL INDONESIA MELALUI CKG SEKOLAH	50



## **POLITIK** **HUT KE-80 RI, BERSATU, BERDAULAT, RAKYAT SEJAHTERA, 6 INDONESIA MAJU**

Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 berlangsung megah dan penuh makna di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Di tengah semarak warna-warni busana adat Nusantara, iringan pasukan kehormatan, dan derap langkah Paskibraka, suasana khidmat menyelimuti detik-detik proklamasi yang menjadi simbol perjuangan panjang bangsa Indonesia.

<u>HUKUM</u>		<u>OPINI</u>	
NADA YANG TAK DIBAYAR: PERGULATAN MUSISI INDONESIA DALAM SISTEM ROYALTI	56	TKA DAN IKHTIAR MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA	77
<u>BUDAYA</u>		<u>TRANSPORTASI</u>	
PACU JALUR MENDUNIA	60	MENEGUHKAN KONEKTIVITAS DAN KEDAULATAN: PENETAPAN 36 BANDARA INTERNASIONAL DALAM BINGKAI ASTA CITA PRESIDEN	80
<u>EDUKASI</u>		<u>FILM</u>	
SEKOLAH RAKYAT, SOLUSI ATAU HANYA SEKEDAR AMBISI	66	SORE: ISTRI DARI MASA DEPAN — CINTA, WAKTU, DAN PILIHAN YANG TAK BISA DIULANG	86
<u>HUKUM</u>			
PRESIDEN PRABOWO INGIN LEPAS DARI BAYANG-BAYANG JOKOWI	72		

# 80 Tahun Merdeka, Saatnya Rakyat Merasa Dimiliki

Saya ingin menyampaikan refleksi pribadi sekaligus harapan kolektif dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Kita telah melewati masa revolusi, pembangunan, reformasi, dan kini memasuki era transformasi. Namun pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah rakyat benar-benar sudah merdeka?

Tema tahun ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” adalah seruan yang indah dan penuh harapan. Tapi harapan tidak cukup jika tidak diiringi dengan keberpihakan nyata. Di tengah gegap gempita upacara dan parade, masih banyak guru honorer yang digaji di bawah layak, petani yang kesulitan pupuk, dan anak-anak yang belajar tanpa listrik. Apakah mereka juga ikut merayakan kemerdekaan, atau hanya menonton dari jauh?

Saya percaya bahwa kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga bebas

dari rasa tidak dianggap. Ketika rakyat merasa dimiliki oleh negaranya—dilindungi, didengar, dan diberdayakan—barulah kemerdekaan itu terasa utuh.

Saya mengapresiasi langkah pemerintah dalam program makan bergizi gratis, revitalisasi rumah sakit, dan pembangunan koperasi desa. Tapi saya juga berharap agar kebijakan tidak berhenti di angka dan pidato. Mari kita pastikan bahwa setiap rupiah dalam RAPBN menyentuh kehidupan nyata, bukan hanya laporan tahunan.

Di usia ke-80 ini, semoga Indonesia tidak hanya semakin maju, tapi juga semakin adil. Karena kemajuan tanpa keadilan hanya akan memperlebar jurang, bukan membangun jembatan.

Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga merah putih tidak hanya berkibar di tiang bendera, tapi juga di hati setiap warga.

**Grizelle Levronka**  
**Kabupaten Bekasi**



## Majalah Cara Pandang

**Dewan Pembina:** Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Faozan Amar, S.Ag, M.M., Jalu Dwi Putranto S.IP

**Pemimpin Umum:** Zulfikar Rachman **Ombudsman:** Mahmud Marhaba (Ahli Pers Dewan Pers) **Direktur:** Michael Malik

**Pimpinan Redaksi dan Penanggung Jawab:** Habibi **Wakil Pimred:** Amir Fiqi, Mujamin Jassin **Koordinator Daerah:** Nafik Muthohirin (Jawa Timur), Wiwin Alfianti (Riau), Hamid Toliu (Gorontalo), Linda Sari (Sumatera Barat) **Redaktur Pelaksana:** Amir Fiqi, Edo Soeryadi **Redaktur:** Rais Syauqi, Jirga R. Azka, Amira Izzati, Wiwin Alfianti, Zoel Rachman, Haedar Zafran **IT Support:** Zulfikar Iskandar, Dede Hidayatullah **Kreatif:** Robby Firmansyah, Hengki **Media Sosial:** Obie **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayah

## Alamat Redaksi Pusat

Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87 Kota Bekasi 17147 Telp: (021) 82760392 dan (021) 21383521  
Email: redaksi@carapandang.com

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi





## Dari Janji Proklamasi ke Tanggung Jawab Sejarah

**D**i tahun 2025, rakyat Indonesia berdiri diambang delapan dekade kemerdekaan. Sebuah usia yang matang bagi sebuah republik, namun juga usia yang menuntut kedewasaan dalam bertindak dan keberanian dalam bercermin. Apa yang telah kita capai? Apa yang masih tertinggal? Dan yang paling penting: ke mana kita hendak melangkah?

Indonesia telah menempuh jalan berliku. Dari revolusi fisik hingga reformasi politik, dari krisis ekonomi hingga kebangkitan digital. Kita menyaksikan transformasi sistem pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan infrastruktur. Namun di balik angka dan grafik, masih ada wajah-wajah yang belum tersentuh oleh kemerdekaan: guru honorer yang bertahan dengan gaji minim, petani yang bergantung pada cuaca, anak-anak yang belajar di ruang kelas tanpa listrik.

Peringatan 80 tahun kemerdekaan bukan hanya soal mengenang, tetapi soal menagih janji. Janji bahwa negara akan melindungi segenap bangsa

dan seluruh tumpah darah Indonesia. Janji bahwa keadilan sosial bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan yang hidup di desa dan kota, di sekolah dan pasar, di rumah sakit dan kantor pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato kenegaraannya, menegaskan bahwa pemerintah telah mengalihkan anggaran dari birokrasi ke rakyat. Program makan bergizi gratis, revitalisasi rumah sakit, dan pembangunan koperasi desa menjadi bukti bahwa negara mulai hadir di ruang-ruang yang selama ini sunyi. Tapi kehadiran negara harus lebih dari sekadar program. Ia harus menjadi rasa: rasa dimiliki, rasa dihargai, rasa didengar.

Kemerdekaan bukan warisan, melainkan tanggung jawab. Ia bukan milik masa lalu, tetapi janji untuk masa depan. Maka, mari kita rayakan kemerdekaan bukan hanya dengan bendera dan parade, tetapi dengan komitmen untuk memperbaiki, menyatukan, dan menghidupi nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.



# HUT KE-80 RI, BERSATU, BERDAULAT, RAKYAT SEJAHTERA, INDONESIA MAJU

Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 berlangsung megah dan penuh makna di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Di tengah semarak warnawarni busana adat Nusantara, iringan

pasukan kehormatan, dan derap langkah Paskibraka, suasana khidmat menyelimuti detik-detik proklamasi yang menjadi simbol perjuangan panjang bangsa Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto tampil sebagai Inspektur Upacara, mengenakan beskap Melayu berwarna

abu-abu dengan kalung melati yang menjuntai di dada. Ia berdiri tegak di mimbar kehormatan, menyambut para tamu undangan dari berbagai penjuru negeri dan dunia. Meski tidak menyampaikan pidato langsung dalam upacara tersebut, pidato kenegaraan Presiden telah disampaikan dua hari





sebelumnya dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo membuka dengan refleksi sejarah. “Pada tanggal 17 Agustus 2025, delapan puluh tahun sudah para pendiri bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya dengan nada tegas namun penuh penghormatan. Ia melanjutkan dengan menyebut satu per satu Presiden terdahulu,

dari Sukarno hingga Joko Widodo, dan menguraikan kontribusi masing-masing dalam membangun bangsa. “Seluruh Presiden pendahulu saya bersama Pemerintah yang mereka pimpin berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita: negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur,” kata Prabowo.

Presiden juga menyoroti pencapaian selama 299 hari masa pemerintahannya. Ia menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 20 juta anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. “Pagi ini

saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional, sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui sudah menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari,” ucapnya dengan bangga. Ia membandingkan pencapaian Indonesia dengan Brasil, yang membutuhkan sebelas tahun untuk menjangkau 40 juta penerima. “Kita capai setengahnya dalam tujuh bulan,” tegasnya.

Dalam bidang ketahanan pangan, Prabowo melaporkan bahwa Indonesia berhasil mencapai surplus beras dengan cadangan nasional lebih dari 4 juta ton. “Untuk pertama kali dalam



puluhan tahun, Indonesia bisa kembali mengeksport beras dan jagung,” katanya. Ia juga mengumumkan kebijakan baru terkait penggilingan beras skala besar yang kini harus mendapat izin khusus dari pemerintah. “Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu. Kami tidak gentar dengan kekayaanmu, karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dengan nada yang menggelegar.

Upacara di Istana Merdeka sendiri berlangsung lancar dan penuh simbolisme. Setelah pengibaran bendera Merah Putih oleh Paskibraka, suasana berubah menjadi lebih meriah dan penuh semangat. Penampilan seni budaya dari berbagai daerah mengisi halaman Istana, termasuk pertunjukan pencak silat oleh Iko Uwais dan ratusan pesilat muda, serta tarian Pacu Jalur dari Riau yang dipadukan dengan

gerakan hip hop oleh Miracle Dancers Family.

Namun, momen paling mencuri perhatian terjadi saat lagu “Tabola Bale” dibawakan oleh Silet Open Up bersama Diva Aurel. Lagu yang menggabungkan nuansa musik Timur Indonesia dengan lirik berbahasa Minang ini langsung mengguncang suasana. Presiden Prabowo, yang awalnya duduk di mimbar kehormatan, turun ke lapangan dan ikut berjoget bersama para tamu undangan, menteri, dan prajurit. “Kaka tabola-bale lia Ade Nona e, su makin manyala e, kaka hati susah e,” terdengar dari pengeras suara, mengiringi gerakan lincah para penari dan hadirin yang larut dalam irama.

Lagu “Tabola Bale” sendiri merupakan karya Silet Open Up, musisi asal Flores yang mengusung genre rap, hip hop, dan RnB. Lagu ini viral sejak dirilis pada April 2025 dan telah ditonton lebih dari 75 juta kali di YouTube. Dalam konteks lagu, “tabola-bale” adalah ungkapan dalam

bahasa Manado yang menggambarkan perasaan galau dan jungkir balik karena jatuh cinta. Liriknya yang jenaka dan iramanya yang menghentak membuat lagu ini menjadi penutup sempurna dalam rangkaian upacara kenegaraan.

Senyum Presiden Prabowo terpancar jelas saat melihat suasana penuh kebahagiaan. Ia sempat menyapa para tamu undangan setelah berjoget, lalu kembali ke mimbar dengan langkah ringan. Momen ini menjadi simbol bahwa kemerdekaan bukan hanya soal sejarah dan perjuangan, tetapi juga tentang kebersamaan, kegembiraan, dan harapan.

Upacara HUT ke-80 RI tahun ini bukan hanya perayaan formal kenegaraan, tetapi juga perayaan rakyat. Dari pidato kenegaraan yang penuh visi, hingga lantunan lagu “Tabola Bale” yang menggoyang Istana, semuanya menyatu dalam semangat Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan terus maju.





## MAKNA LOGO HUT KE-80 RI

Logo resmi HUT ke-80 Republik Indonesia tahun 2025 bukan sekadar angka atau desain grafis—ia adalah simbol visual dari perjalanan panjang bangsa menuju satu abad kemerdekaan. Dirancang melalui sayembara nasional yang melibatkan ratusan desainer, logo ini mengusung filosofi mendalam yang mencerminkan semangat persatuan, kedaulatan, kesejahteraan, dan kemajuan.

Desain utama menampilkan angka “80” berwarna merah putih, yang secara visual membentuk simbol tak terhingga (∞). Bentuk ini melambangkan kesinambungan perjuangan dan semangat kemerdekaan yang tidak pernah padam. Angka delapan dan nol saling terhubung melalui garis sirkular yang utuh, menjadi representasi dari gerak kolektif bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.

Dua bidang silinder yang membentuk angka

8 dan 0 dimaknai sebagai pilar persatuan dan kedaulatan—dua fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Garis merah tegas yang membelah desain merepresentasikan komitmen terhadap pemerataan kesejahteraan rakyat, sekaligus energi juang yang terus menyala.

Secara keseluruhan, logo ini merefleksikan visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Ia menjadi ajakan visual untuk melangkah bersama, dengan semangat gotong royong dan optimisme tinggi, menuju Indonesia yang progresif, kompetitif, dan dihormati dunia.

Logo ini juga membawa pesan “Dimiliki Bersama, Dirayakan Bersama”—bahwa kemerdekaan bukan milik segelintir elite, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Filosofi ini terasa dalam bentuknya yang inklusif dan dinamis, mengajak semua elemen bangsa untuk terlibat aktif dalam pembangunan dan perayaan kemerdekaan.



**Bersatu Berdaulat  
Rakyat Sejahtera  
Indonesia Maju**

## Makna Tema HUT Ke-80 RI

Tema resmi HUT ke-80 Republik Indonesia tahun 2025 adalah: “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah refleksi mendalam atas perjalanan delapan dekade kemerdekaan dan arah masa depan bangsa menuju satu abad Indonesia merdeka.

Makna dari tema ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **Bersatu, Berdaulat**

Frasa ini menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, “bersatu” adalah fondasi utama untuk membangun kekuatan nasional. Sementara “berdaulat” menegaskan kemandirian bangsa dalam menentukan arah politik, ekonomi, dan budaya tanpa intervensi asing. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persatuan adalah kekuatan fundamental bangsa:

*“Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika—berbeda-beda tapi satu.”*

### **Rakyat Sejahtera**

Bagian ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan adalah wujud nyata dari visi ini. Tema ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk memastikan bahwa kemerdekaan tidak hanya dirayakan, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh seluruh rakyat.

### **Indonesia Maju**

Frasa penutup ini adalah visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Ia menggambarkan ambisi Indonesia untuk menjadi negara yang progresif, kompetitif, dan dihormati di kancah internasional. “Indonesia Maju” bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang kemajuan sosial, teknologi, dan budaya yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tema HUT RI ke-80 adalah ajakan kolektif: untuk bersatu dalam semangat kebangsaan, menjaga kedaulatan, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan melangkah bersama menuju masa depan yang lebih cerah. Ia menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah titik akhir, melainkan titik tolak untuk terus bergerak maju sebagai bangsa yang besar dan bermartabat.





Bersatu Berdaulat  
Rakyat Sejahtera  
Indonesia Maju

# DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

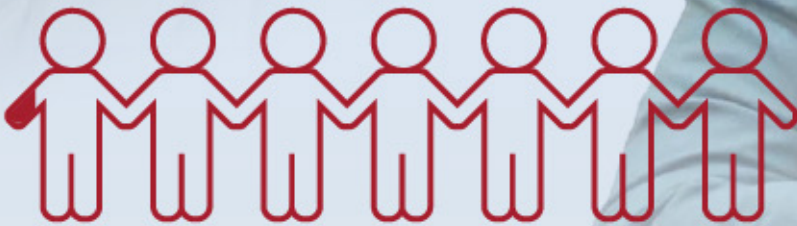


# Rapor Ekonomi Indonesia di HUT Kemerdekaan Ke-80

## Kemiskinan (Maret 2025)



**23,85 juta** orang miskin (8,47 persen populasi)



**2,38 juta** Orang miskin ekstrem (0,83 persen populasi)

Garis kemiskinan:  
**Rp609.160** per orang per bulan

## Pekerja (Februari 2025)



**153,05 juta** orang angkatan kerja  
7,28 juta Orang pengangguran



Produk Domestik  
Bruto (PDB)  
**Rp3.396,3 T**  
(kuartal II 2025)



Neraca  
perdagangan  
**US\$19,48 miliar**  
(Jan-Jun 2025)

Indonesia mencatatkan  
surplus neraca perdagangan  
selama 62 bulan berturut-turut  
sejak Mei 2020.



Pertumbuhan  
MI ekonomi  
**5,12 persen**  
(kuartal II 2025)



Cadangan devisa  
**US\$152 M**  
setara 6,2 bulan  
impor plus bayar  
utang (Juli 2025)



Cadangan emas  
**220 ton**



Utang luar negeri  
**US\$430,4 M/  
Rp7.144,6 T**  
(kuartal I 2025)





**DELAPAN PULUH TAHUN MERDEKA:**

# **PRABOWO MENEGASKAN ARAH BARU INDONESIA**

**P**residen Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus 2025. Dalam suasana khidmat menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Presiden Prabowo membuka pidatonya dengan ajakan untuk mengenang perjuangan para pendiri bangsa yang memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. “Delapan puluh tahun sudah para pendiri bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Prabowo.





Ia melanjutkan dengan refleksi sejarah, menyebut bagaimana bangsa Indonesia berjuang selama lima tahun pasca-proklamasi, dengan senjata dan diplomasi, hingga kedaulatan benar-benar diakui pada tahun 1949. Prabowo kemudian memberikan penghormatan kepada para Presiden terdahulu, dari Soekarno hingga Joko Widodo, yang menurutnya telah bekerja keras membangun bangsa dan meletakkan fondasi bagi Indonesia yang adil dan makmur. “Seluruh presiden pendahulu saya bersama pemerintah yang mereka pimpin berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” tegasnya.

Presiden Prabowo juga menyampaikan

capaian pemerintahannya selama hampir 300 hari menjabat. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen, dan investasi semester I 2025 menembus Rp942 triliun, meningkat 13,6 persen dari tahun sebelumnya. “Perkembangan ekonomi ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 1,2 juta orang,” katanya. Ia menekankan bahwa pemerintah berhasil menyelamatkan Rp300 triliun anggaran negara yang sebelumnya digunakan untuk perjalanan dinas dan kegiatan administratif, dan kini dialihkan untuk kepentingan rakyat.

Salah satu program unggulan yang dibanggakan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disebut telah menjangkau puluhan juta anak dan ibu hamil. “Program ini bukan hanya soal gizi, tapi juga membuka



lapangan kerja dan memberdayakan UMKM lokal,” ucap Prabowo. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia kini telah mampu mengekspor beras dan jagung, dengan cadangan beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pentingnya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Ia memperkenalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Ia juga menyebut pembangunan 100 Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

Presiden menutup pidatonya dengan seruan kebangsaan. Ia meminta dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk

MPR RI dan partai politik, dalam upaya pemberantasan tambang ilegal dan penguatan kedaulatan nasional. “Saya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melindungi praktik ilegal yang merugikan rakyat,” tegasnya.

Pidato kenegaraan Prabowo Subianto bukan hanya laporan kinerja, tetapi juga penegasan arah pembangunan nasional yang berakar pada sejarah, berorientasi pada keadilan sosial, dan berpijak pada semangat gotong royong. Dalam suasana menjelang peringatan kemerdekaan, pidato ini menjadi penanda komitmen pemerintah untuk melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan bermartabat

RAPBN 2026:

# ANGGARAN RAKYAT, AGENDA BANGSA





**R**ancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencerminkan arah baru pemerintahan dalam membangun Indonesia yang lebih mandiri, sehat, dan inklusif. Dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025, delapan prioritas utama ditetapkan sebagai fondasi transformasi nasional. Bukan sekadar alokasi dana, melainkan strategi menyeluruh untuk menjawab tantangan struktural dan mempercepat kemajuan.

Ketahanan pangan menjadi prioritas awal dengan anggaran sebesar Rp164,4 triliun. Pemerintah menargetkan swasembada beras dan jagung melalui pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi, penyediaan bibit unggul, dan modernisasi alat pertanian. Langkah ini bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal kedaulatan dan kesejahteraan petani di seluruh pelosok negeri.

Di sektor energi, pemerintah mengalokasikan Rp402,4 triliun untuk memperkuat ketahanan dan mendorong transisi menuju energi bersih. Subsidi untuk BBM, listrik, dan LPG 3 kg tetap dijaga demi menjaga daya beli masyarakat, sementara pengembangan energi baru terbarukan seperti surya, hidro, dan panas bumi mulai digencarkan sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan.



Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu sorotan utama dengan anggaran Rp335 triliun. Menyasar lebih dari 82 juta penerima, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita, program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus memberdayakan UMKM, petani, dan nelayan lokal sebagai penyedia

bahan pangan. Ini adalah investasi jangka panjang dalam kesehatan dan produktivitas bangsa.

Pendidikan tetap menjadi prioritas fundamental dengan alokasi Rp757,8 triliun atau 20 persen dari total APBN. Pemerintah memperkuat program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dan LPDP, serta membangun sekolah unggul





Garuda di berbagai daerah. Fokusnya bukan hanya pada akses, tetapi juga pada peningkatan mutu, pemerataan, dan penguatan karakter generasi penerus.

Di bidang kesehatan, anggaran sebesar Rp244 triliun diarahkan untuk revitalisasi rumah sakit, penanganan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pengendalian penyakit menular seperti TBC. Pemerintah menegaskan bahwa layanan kesehatan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari kota besar hingga desa terpencil.

Pemberdayaan ekonomi lokal diwujudkan melalui program Desa dan Koperasi Merah Putih. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dengan dukungan

pinjaman bunga rendah dan pelatihan manajemen usaha. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dari akar rumput, memperkuat UMKM, dan membuka lapangan kerja di tingkat lokal.

Modernisasi pertahanan menjadi prioritas strategis dengan pendekatan pertahanan semesta. Pemerintah memperkuat alutsista, membangun komponen cadangan, dan mendorong industri pertahanan dalam negeri agar mampu mandiri dan berdaya saing. Pertahanan tidak lagi dipandang semata sebagai urusan militer, tetapi sebagai kesiapsiagaan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Terakhir, akselerasi investasi dan

pembangunan perumahan rakyat menjadi bagian penting dari agenda 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta rumah melalui skema FLPP, BSPS, dan PPN DTP. Di sisi lain, hilirisasi proyek strategis nasional dipercepat untuk menarik investasi dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Total anggaran untuk delapan prioritas ini mencapai Rp2.741 triliun, mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia yang berdaulat, sehat, cerdas, dan berkeadilan. RAPBN 2026 bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan peta jalan menuju masa depan yang lebih inklusif dan bermartabat.

# 8 Delapan Agenda Prioritas RAPBN 2026 Presiden Prabowo



## Ketahanan Pangan

Rp164,4 triliun

Alokasi ini termasuk Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk dan Rp22,7 triliun untuk memperkuat peran Bulog nasional.



## Ketahanan Energi

Rp402,4 triliun

Dialokasikan menjaga harga energi stabil, subsidi tepat sasaran, dan percepatan transisi EBT. Percepat pembangunan pembangkit listrik bersih.



## Makan Bergizi Gratis (MBG)

Rp335 triliun

Menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, balita, dan masyarakat terdampak. Memberdayakan UMKM lokal, menciptakan lapangan kerja baru.



## Pendidikan Bermutu

Rp757,8 triliun

Pemerintah alokasikan untuk guru, fasilitas pendidikan, beasiswa, dan pendidikan vokasi.



## Kesehatan Berkualitas

Rp244 triliun

Difokuskan pada Jaminan Kesehatan Nasional, stunting, gizi balita, rumah sakit, dan masyarakat rentan.



## Perekonomian Rakyat

Pemerintah hidupkan ekonomi desa melalui 80 ribu Koperasi Merah Putih, UMKM, distribusi sembako, pupuk, dan pembiayaan murah.



## Pertahanan Semesta

Pemerintah melakukan modernisasi alat utama sistem pertahanan, perkuat komponen cadangan, dan tingkatkan kesejahteraan prajurit patriot bangsa.



## Investasi dan Perdagangan Global

Percepat proyek hilirisasi senilai USD 38 miliar. Mendukung program pembangunan rumah layak huni dengan target total 770.000 rumah pada 2026 mendatang.







# BENDERA ONE PIECE SIMBOL PERLAWANAN SIMBOLIK BUKAN MAKAR

**Berkibarnya bendera One Piece yang sejajar dengan bendera Merah Putih menyambut perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-80 bukan ancaman, tapi kritik suara rakyat yang butuh kesejahteraan dan keadilan.**

Ada yang berbeda pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Yang biasanya dalam menyambut hari kemerdekaan warga mengibarkan bendera Merah Putih sebagai simbol rasa cinta kepada tanah air, namun di ulang tahun RI ke-80 ramai-ramai muncul bendera One Piece, sebuah kartun anime yang dikibarkan sejajar dengan bendera Merah Putih.

Fenomena pengikabaran bendera

One Piece pun viral di jagad media sosial. Dan ini terjadi merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Pengibaran bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami yang ada dalam cerita One Piece merupakan perjuangan Jolly Roger yang merupakan simbol perlawanan terhadap penguasa, kebebasan, persatuan, dan solidaritas bajak laut. Pengguna media sosial kemudian mengaitkan pengibaran

bendera ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kinerja pemerintahan.

Aksi pengibaran bendera One Piece di momen hari kemerdekaan Indonesia ini pun menuai pro dan kontra. Bagi yang pro, aksi pengibaran bendera One Piece dinilai bentuk ekspresi dari masyarakat yang ingin menyampaikan suara hatinya melihat kondisi bangsa yang semakin jauh dari tujuan bangsa ini dimerdekakan, yakni menghadirkan kehidupan bangsa yang sejahtera dan berkeadilan.

Sementara, pihak yang kontra memandang aksi pengibaran bendera One Piece yang sejajar dengan bendera Merah Putih merupakan tindakan yang tidak menghormati kesakralan hari kemerdekaan. Bahkan, para pejabat di negeri ini menilai aksi ini merupakan gerakan makar terhadap pemerintah yang sah.

Pemerintah terlihat sangat berlebihan dalam merespon fenomena tersebut. Bentuk berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah dengan merazia bendera One Piece dan penghapusan mural One Piece di seluruh wilayah Indonesia.

Seperti terjadi di Kabupaten Sleman penghapusan dua mural Jolly Roger di Padukuhan Temulawak, Triharjo, Sleman. Proses menghapus mural itu disaksikan aparat setempat.

Adapun salah satu mural bertema One Piece itu dilukis di tembok rumah warga. Penghapusan mural itu dilakukan oleh para pemuda sendiri dengan dipantau oleh aparat TNI dan Polri setempat pada Kamis (7/8) sore.

Babinsa Kalurahan Triharjo, Serma Hadi Suroso, mengatakan penghapusan lambang bajak laut Topi Jerami atau Straw Hat Pirates (SHP) itu dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan desa setempat dan pemilik tembok.



**Dandim 0725 Sragen Letkol Inf Ricky Julianto Wuwung**

“Kita sebagai Babinsa dan Bhabinkamtibmas sangat mengapresiasi untuk menghilangkan gambar tersebut karena (mural) berlandaskan Bendera Merah Putih, yang nggak kami suka itu,” kata Hadi kepada wartawan di lokasi, Kamis (7/8/2025).

Hal yang sama juga dilakukan Komando Distrik Militer (Kodim) 0725/Sragen. Penghapusan mural bertema One Piece di Jalan Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah atas dasar kesepakatan bersama antara warga, perangkat desa, dan aparat keamanan.

Dandim 0725/Sragen, Letkol Inf Ricky Julianto Wuwung mengatakan bahwa mural tersebut dihapus menyusul imbauan agar perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia diwarnai dengan semangat nasionalisme dan simbol-simbol kenegaraan seperti bendera Merah Putih.

“Kegiatan tersebut merupakan hasil koordinasi seluruh pihak terkait (Apkam, perangkat desa, dan warga setempat) yang menetapkan bahwa gambar tersebut perlu dihapus, mengingat saat ini berada dalam momen penting menjelang Hari Ulang

Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80,” kata Ricky, kepada Kompas.com, Senin (4/8/2025).

### **Pemerintah Merasa Terancam**

Respon pemerintah dalam menghadapi fenomena pengibaran bendera One Piece pun berlebihan. Para pejabat dalam pernyataan menghakimi bahwa aksi tersebut merupakan ancaman terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, pemerintah menuding bahwa aksi tersebut mengandung unsur pidana.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan bahwa pengibaran bendera Jolly Roger jelang peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus merupakan tindakan yang mencederai kehormatan bendera Merah Putih. Maka tindakan tersebut jelas mengandung unsur tindak pidana.

Dia menjelaskan bahwa pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang



**Natalius Pigai**

Negara, serta Lagu Kebangsaan. Maka sudah jelas bahwa setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apa pun.

Sehingga pemerintah akan mengambil tindakan hukum atas perbuatan pengibaran bendera One Piece. “Ini adalah upaya kami melindungi martabat dan simbol negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Bahkan Pigai dengan tegas menyatakan negara berhak melarang pengibaran bendera One Piece sebab aksi tersebut dianggap telah melanggar hukum sekaligus sebagai bentuk makar.

“Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara,” tegas Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (03/08).

Dan dia pun mengklaim bahwa pelarangan tersebut sejalan dengan aturan internasional mengenai hak

negara dalam mengambil sikap atas isu-isu tertentu yang menyangkut integritas nasional dan stabilitas negara.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa keputusan pelarangan tersebut akan mendapatkan dukungan dan penghargaan dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini sejalan dengan kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik yang diadopsi Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 mengenai pengesahan kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. UU tersebut membuka ruang bagi negara untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional.

“Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan. Langkah ini menunjukkan bagaimana hukum nasional dan internasional saling bersinergi dalam menjaga stabilitas negara,” ujar Pigai.

Sehingga dia tegas mengatakan bahwa pelarangan mengibarkan bendera One Piece dalam menyambut hari kemerdekaan RI tidak ada kaitannya dengan sikap pemerintah yang membatasi ke kebebasan ekspresi warga negara.

“Sikap pemerintah adalah demi ‘core of national interest) atau Kebebasan ekspresi yang bisa dibatasi negara,” tegasnya.

### **Upaya Memecah Belah**

Pengibaran bendera One Piece juga direspon dengan sinis oleh para wakil rakyat yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Menurutnya aksi pengibaran bendera tersebut bisa



**Sufmi Dasco Ahmad**

memecah belah persatuan bangsa.

Pernyataan tersebut seperti diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dengan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap solid menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah upaya memecah belah melalui aksi pemasangan bendera One Piece.

Politisi Partai Gerindra ini mengklaim bahwa dia telah mendeteksi adanya upaya memecah belah persatuan dan kesatuan. Menurutnya ada kekuatan-kekuatan yang tidak suka dengan kemajuan bangsa ini. Sehingga upaya memecah belah pun dilakukan.

“Harus melawan hal-hal seperti itu. Mari bersatu, lawan,” ucapnya.

Di waktu yang berbeda, Dasco mengatakan bahwa pada dasarnya kreativitas dalam penggunaan bendera One Piece tidak menjadi masalah. Namun, dia mengingatkan hal itu agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Menurut Dasco, bendera tersebut secara visual disukai dan disenangi oleh banyak kalangan, dan DPR memandang hal itu sebagai bentuk



kreativitas positif.

Tapi dia mengingatkan agar kreativitas positif ini justru disalahgunakan untuk niat-niat tidak baik yang mengarah kepada upaya memecah belah bangsa ini.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo.

Dia menilai pihak yang lebih memilih memasang bendera One Piece daripada memasang bendera Merah Putih saat menyambut hari kemerdekaan Indonesia merupakan bagian dari provokasi untuk menyerang pemerintahan Prabowo Subianto.

“Ini cara-cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan,” katanya.

Menurut Firman pengibaran bendera serial anime asal Jepang menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia itu tidak boleh dilakukan. Firman meminta ada tindakan tegas dari penegak hukum mencari provokator.

“Ini harus ditindak tegas. Minimal mereka yang melakukan diinterogasi siapa yang menyuruh dan apa motifnya,” katanya.

### **Respon Presiden Prabowo**

Berbeda dengan para menteri dan anggota DPR, Presiden Prabowo melihat fenomena pengibaran bendera One Piece dengan lebih santai.

Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bahwa Kepala Negara tidak masalah bila pengibaran bendera tersebut sebatas bentuk ekspresi.

“Kalau sebagai bentuk ekspresi ya it’s okay, nggak ada masalah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/8).

Namun, kata Prasetyo, Prabowo



menghimbau agar bentuk ekspresi mengibarkan bendera One Piece tidak dibenturkan dengan bendera Merah Putih.

“Tapi jangan ini dibawa, dibentur-benturkan, disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih. Nggak sehat, tidak seharusnya seperti ini, kita sebagai anak bangsa bendera Merah Putih itu satu-satunya,” ucapnya.

Saat ditanya soal makna pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, Prasetyo menegaskan bahwa Istana terbuka terhadap bentuk kritik.

“Nggak ada masalah. Kalau makna kritikan kita sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka, dan kita menyadari kok, kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah. Masih banyak yang harus kita perbaiki,” kata Prasetyo.

Selanjutnya dia berharap agar ungkapan ekspresi dan kreativitas dari warga dengan cara mengibarkan bendera One Piece tidak ditunggangi pihak lain. Seharusnya di moment peringatan hari Kemerdekaan

Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Dia mengajak kepada seluruh generasi muda untuk mengingat jasa para pahlawan bangsa yang rela berkorban untuk menghantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaan. Katanya, tugas generasi saat ini adalah bagaimana menjaga kemerdekaan ini dengan mengisinya melalui karya-karya yang menghanarkan bangsa ini menuju pada kejayaan.

“Tapi, yang jadi masalah atau mungkin akan jadi persoalan manakala ada pihak-pihak atau pihak-pihak yang kemudian menggunakan kreativitas teman-teman komunitas ini untuk hal-hal yang kurang pas. Yang secara waktu juga tidak pas, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kemerdekaan kita itu diraih bukan hadiah, itu pengorbanan para pahlawan. Kita sebagai generasi muda ini tugasnya sekarang menjaga itu,” katanya.

### **Ekspresi perlawanan simbolik**

Fenomena pengibaran bendera serial animasi asal Jepang, One Piece



**Prasetyo Hadi**

marak menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan. Aksi ini ditengarai sebagai sikap ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah.

Rasa kecewa rakyat terhadap pemerintah saat ini sangat beralasan, sebab rakyat merasakan beban hidup yang sangat berat, sulitnya mendapatkan pekerjaan, ekonomi yang semakin lesu, ditambah penegakan hukum yang tidak berkeadilan.

Rasa kecewa masyarakat semakin menggunung melihat para pejabat di negeri ini seolah-olah tidak peduli kepada nasib rakyat kecil yang semakin sulit. Efisiensi anggaran tidak berlaku bagi para pejabat yang bisa menikmati gaji tinggi. Ditambah kasus korupsi di negeri ini semakin subur.

Maka sangat wajar rakyat mengekspresikan kekecawaannya melalui perlawanan simbolik yakni dengan mengibarkan bendera One Piece.

Seperti diungkapkan oleh peneliti dari Center for Digital Society (CfDS) FISIPOL UGM, Ayom Mratita Purbandani mengatakan bahwa fenomena pengibaran bendera One Piece jangan dianggap sebagai ancaman negara. Menurutnya fenomena ini lebih tepat dipahami

sebagai ekspresi perlawanan simbolik dan bentuk kebebasan sipil.

Dia menjelaskan bahwa penggunaan simbol dari budaya populer telah menjadi sarana masyarakat dalam menyampaikan kritik sosial secara kreatif.

“Ini adalah ekspresi protes yang sifatnya simbolik. Idiom budaya populer digunakan sebagai media kritik, mirip dengan simbol salam tiga jari di Thailand atau semangka yang digunakan sebagai simbol dukungan terhadap Palestina,” ujarnya dilansir [ugm.ac.id](http://ugm.ac.id).

Ayom menjelaskan bahwa bentuk perlawanan semacam ini bersifat spontan, emosional, dan lebih cepat menyebar di media sosial, berbeda dari demonstrasi konvensional.

Maka itu, dia mengingatkan kepada pemerintah tidak usah berlebihan dari merespon fenomena tersebut. Jika pemerintah memandang aksi ini sebagai aksi makar, pemerintah sedang mempertontonkan *political paranoid*.

Menurutnya jika pemerintah berlebihan dalam merespon fenomena tersebut bisa menimbulkan kesan bahwa ruang kebebasan sipil semakin menyempit.

“Aksi seperti ini umumnya tidak bertahan lama dan tak terorganisir secara struktural. Tapi jika pemerintah meresponsnya dengan keras, maka pesan protesnya justru jadi makin kuat,” ungkap Ayom.

Bagi generasi muda, idiom budaya populer adalah media yang efektif untuk menyampaikan kritik. Cara ini mampu menjangkau lebih banyak kalangan karena bersifat ringan dan mudah dipahami. “Anak muda sekarang punya banyak cara untuk bersuara. Mereka menggunakan simbol yang familiar agar pesannya diterima secara luas,” jelasnya.



**Ayom Mratita Purbandani**

Ayom pun mengingatkan pentingnya sikap bijak dari pemerintah dalam menyikapi fenomena semacam ini. “Perlawanan simbolik seperti ini justru membuka ruang baru bagi praktik politik yang lebih imajinatif dan inklusif. Ketimbang bersikap reaktif, lebih baik ini dilihat sebagai bentuk kritik yang perlu didengarkan,” tambahnya.

Sebagai penutup, Ayom menekankan bahwa meski protes ini bernuansa politis, bentuk penyampaiannya jauh lebih efektif dan komunikatif. Hal itu membuat publik lebih mudah merasa terhubung dengan pesan yang dibawa. “Perlawanan ini tidak frontal, tapi justru efektif karena menyentuh sisi kemanusiaan dan imajinasi khalayak” ucapnya.

### **Bukan gerakan radikal**

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Sosiolog politik, Dr. Arie Sujito. Menurutnya fenomena pengibaran bendera One Piece ini bukanlah suatu bentuk gerakan radikal.

Simbol-simbol yang dipakai melambangkan cerita perjuangan dan perjalanan panjang dalam mencapai sesuatu. Bukan sebuah hal baru yang





muncul sebagai respon masyarakat terhadap dunia politik.

Menurut Arie, fenomena ini bukan pertanda dari satu krisis politik atau ekonomi, melainkan akumulasi dari rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Media sosial berhasil mengakomodasi ekspresi tersebut sehingga masyarakat dapat menunjukkan kegelisahannya. Hal ini tentunya lumrah dilakukan dan tidak seharusnya menuai tanggapan represif dari pemerintah.

“Melarang tidak akan efektif. Motor resonansi yang baik itu terbuka, artikulasinya cukup bagus dan ada pesan yang wajib diketahui. secara simbolik dan substansial beginilah cara orang-orang mengingatkan bahwa ada isu penting,” tutur Arie.

Ia menyebut berbagai isu yang penting seringkali terabaikan akibat banyaknya informasi trivia yang hadir di media sosial. Adanya fenomena bendera One Piece sebetulnya cukup berhasil dalam menyajikan isu substansial di hadapan masyarakat. Bahwa ada aspek keadilan dan krisis

nasional yang perlu menjadi perhatian dan didengarkan oleh pemerintah.

Sementara itu Budayawan, Prof. Faruk menyatakan bahwa ada perubahan tren dalam merayakan kemerdekaan Indonesia. Jika dulu selebrasi merah putih cenderung disimbolkan dengan gapura, bambu runcing, dan bendera, kini pemaknaan tersebut dikemas dalam bentuk yang lebih menarik. Persoalannya apakah gerakan tersebut organik atau dimobilisasi oleh pihak tertentu.

Dia menjelaskan jika gerakan tersebut cenderung spontan dan tidak berkelanjutan maka bisa jadi gerakan dirintis secara tidak organik. Dengan kata lain ada pihak-pihak yang mengendalikan situasi agar bergerak dengan kepentingan tertentu.

Namun tidak dengan fenomena pengibaran bendera One Piece kali ini. Faruk menganggap, ada kelanjutan dari gerakan Indonesia Gelap dan Darurat Konstitusi yang sebelumnya telah digaungkan.

“Bisa dilihat apakah ini protes politis atau kreativitas. Dilihat dari sisi kreatif,



**Faruk**



**Arie Sujito**

ini kan strategi komunikasi yang unik dengan menyampaikan kritik melalui konteks tertentu,” ucap Faruk.

Dia mengatakan bahwa fenomena ini merupakan perubahan gaya anak muda dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah di momen hari kemerdekaan. Maka, jangan sampai kritik tersebut direpson berlebihan dengan menilainya sebagai gerakan radikal.

“Apa yang mereka sampaikan adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi negara yang memprihatinkan saat ini,” ujarnya.



# Bendera One Piece: Makna Logo dan Artinya dalam Dunia Bajak Laut Fiksi

Tengkorak putih tersenyum lebar, mengenakan topi jerami, itu **logo Kru Luffy**.



## Apa Itu **Jolly Roger** di One Piece?

Dalam dunia bajak laut, bendera adalah identitas.

Biasanya bergambar tengkorak dan tulang, desainnya mencerminkan kepribadian kapten dan tujuan kru.

Bukan cuma pajangan, tapi **simbol reputasi dan kekuatan**.

### **Maknanya:**

#### **Topi jerami:**

Warisan mimpi.

#### **Tulang bersilang:**

Lambang bajak laut.

#### **Senyuman:**

Semangat bebas Luffy yang tak pernah padam.

## **Bendera yang Punya Fungsi Strategis**

Bagi bajak laut fiksi, logo bukan cuma estetika.

Saat reputasi mereka tumbuh, bendera itu **cukup untuk membuat musuh gentar**.

Bagi kru, **ini lambang persatuan**.

Bagi lawan, **ini bisa jadi teror**.

## **Usopp,**

### **Si Penggambar Logo**

Meski awalnya dianggap lucu dan tak serius, desainnya justru dipasang di kapal.

Buktinya, setiap anggota punya peran penting, termasuk soal identitas.



80

Bersatu Berdaulat  
Rakyat Sejahtera  
Indonesia Maju



**MARI BERSAMA MEWUJUDKAN**  
#PendidikanBermutuUntukSemua





# **KADO PRESIDEN UNTUK GURU DAN IKHTIAR TINGKATKAN KOMPETENSI DAN KESEJAHTERAAN GURU**



**Guru adalah aktor utama dalam dunia pendidikan. Maka kesejahteraan dan kompetensi guru harus terus ditingkatkan demi kualitas pembelajaran yang lebih baik.**

Peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi konsen penting di era pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah menyadari benar untuk menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045 harus dibekali dengan generasi Indonesia yang unggul.

Maka itu, peran dunia pendidikan sangat penting untuk mewujudkan upaya tersebut. Pemerintah telah meluncurkan beberapa program dalam rangka upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu programnya adalah memberikan perhatian besar bagi para guru di Indonesia.

Sudah saatnya guru mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Sebab, atas jasa-jasa mereka pendidikan di Indonesia bisa berjalan. Sebab guru merupakan aktor utama dalam dunia pendidikan.

Bentuk perhatian pemerintah salah satunya pada peringatan ke-80 Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Presiden Prabowo memberikan kado Istimewa bagi para guru di seluruh Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi meluncurkan “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru”. Ini merupakan inisiatif ambisius yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi para pahlawan tanpa jasa.

**Semangat tingkatkan kompetensi**

Peluncuran tersebut digelar di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Rabu, 6 Agustus 2025. Peluncuran yang disiarkan langsung melalui kanal resmi Kemdikdasmen dihadiri sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.

Acara ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menuturkan bahwa pemberian kado ini bertujuan untuk memberikan semangat bagi para guru untuk terus meningkatkan kualitas diri.

Menurut Abdul Mu'ti jika para guru di seluruh Indonesia memiliki semangat yang kuat dalam meningkatkan kualitas diri ini akan sangat berdampak bagi peningkatan kualitas pembelajaran untuk para peserta didik.

“Program-program tersebut merupakan terobosan pemerintah sekaligus kado Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk para guru. Dengan kado tersebut, para guru

sebagai garda terdepan pendidikan, diharapkan meningkatkan kinerja dan kompetensi guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujar Abdul Mu'ti di Plaza Insan Berprestasi Gedung A Kemendikdasmen, Rabu, 6 Agustus 2025.

Dia menyebutkan ketiga kado yang diberikan pemerintah kepada guru merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara internal. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas, kompetensi, dan kesejahteraan guru.

“Untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara internal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berusaha meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kesejahteraan guru, sebagai pemenuhan janji dan program prioritas,” ujarnya.





**Lalu Hadrian Irfani**

Selanjutnya dia menjelaskan adapun 3 kado yang diberikan Presiden Prabowo untuk guru yakni, *Pertama* : Insentif untuk Guru Non-ASN. Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa pemberian insentif untuk guru non-ASN ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Dia mengatakan bahwa insentif ini diberikan sebesar Rp 300 ribu untuk 7 bulan yang dananya ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. Dan dia menyebut pihaknya sudah mentransfer batuan sebesar Rp 716 miliar atau mencapai lebih dari 85%.

Kado *kedua*: Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik Nonformal. Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa BSU diberikan untuk 253.407 guru PAUD nonformal sebesar Rp 300 ribu untuk 2 bulan. Total BSU yang disediakan Kemendikdasmen sekitar Rp 152 miliar ke rekening masing-masing guru.

Kemudian kado *ketiga* yaitu Bantuan Afirmasi Kualifikasi S1/D4. Pada kado ketiga ini Kemendikdasmen

menyediakan bantuan afirmasi kualifikasi S1/D4 bagi 12.500 guru untuk memenuhi syarat kualifikasi akademik S1 atau D4. Pembelajaran nantinya dilakukan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi.

“Dana yang dialokasikan sebesar Rp 37,5 miliar,” papar Mu'ti.

Mendikdasmen berharap dengan adanya ketigakado tersebut para guru di seluruh Indonesia bisa meningkatkan kinerja dan kompetensi mereka. Sehingga, kualitas pembelajaran juga bisa ikut meningkat.

“Para guru diharapkan meningkatkan kinerja dan kompetensi guna meningkatkan kualitas pembelajaran untuk kemajuan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa, peradaban bangsa, dan kejayaan bangsa dan negara,” ujarnya.

Acara ditutup dengan prosesi peluncuran simbolis yang menandai dimulainya implementasi program-program sebagai wujud harapan baru bagi masa depan pendidikan di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Yayan Sumiati, Guru dari Kelompok Bermain (KB) Dahlia asal Kabupaten Pandeglang, Banten, merasa bersyukur karena mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah.

Yayan Sumiati adalah satu dari lima perwakilan lembaga pendidikan yang diundang secara khusus untuk menghadiri acara peluncuran program “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru” yang diselenggarakan di Kemendikdasmen.

Menurutnya bantuan yang diberikan pemerintah ini sangat berarti, terutama bagi guru PAUD di perkampungan seperti dirinya yang tidak mendapatkan tunjangan tetap.



“Pada intinya kita sangat berterima kasih atas bantuan BSU-nya. Mudah-mudahan kami sejahtera,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa guru PAUD di daerahnya sangat bergantung pada infak dari anak sekolah karena tidak ada iuran seperti SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang lazim di perkotaan.

“Kalau dari kota mungkin ada semacam SPP, tapi kalau kita tidak ada sama sekali SPP itu,” ujarnya.

Pada kesempatan ini dirinya sangat





berharap program bantuan ini tidak hanya berhenti saat ini, tetapi dapat terus berlanjut. Bahkan, ia berharap nominal bantuan dapat ditingkatkan di masa mendatang.

“Harapan saya sih, sesudah ini kalau bisa sih ditambahkan lagi nominalnya,” ujarnya.

Selanjutnya dia juga berharap program ini menjadi motivasi bagi guru PAUD lainnya untuk terus mengabdikan dan mendidik generasi penerus bangsa, meski dengan keterbatasan

yang ada.

#### **DPR Menyambut Baik**

Perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru di seluruh Indonesia mendapat sambutan baik dari wakil rakyat.

Langkah Presiden Prabowo yang telah meluncurkan tiga program strategis terkait kesejahteraan guru atau tenaga pendidik di Tanah Air mendapat apresiasi oleh Wakil Ketua

Komisi X DPR RI, Lalu Hadiran Irfani.

Menurutnya program tersebut merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia lebih berkualitas.

“Tentu, kami di Komisi X DPR menyambut baik komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di hari istimewa, jelang kemerdekaan, Presiden menunjukkan bukti konkret jika pemerintah benar-benar

menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan tenaga pendidik,” kata Lalu melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 Agustus 2025.

Menurutnya, sejauh ini program-program yang telah digagas sejalan dengan Asta Cita yang digaungkan Presiden Prabowo. Baginya, Presiden Prabowo memperlihatkan upayanya dalam melahirkan manusia-manusia unggul melalui pendidikan.

Selanjutnya Politikus dari PKB ini berharap insentif dan beasiswa yang digelontorkan pemerintah dapat meringankan beban guru. Khususnya, mereka yang bertugas di daerah dan belum memenuhi kualifikasi akademik minimal maupun status kepegawaian yang pasti.

“Bantuan ini diharap membantu tenaga didik, khususnya para guru yang ditugaskan di daerah-daerah pelosok. Terutama, tenaga didik yang statusnya belum pasti,”ujarnya.

DPR katanya akan terus mengawal program yang diluncurkan Presiden Prabowo tersebut. Bahkan, DPR juga akan mendorong pemerintah untuk membuat gagasan-gagasan baik lainnya yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Di samping dari itu, Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen mengawal pelaksanaan tiga program ini agar tepat sasaran.

Menurutnya program yang bagus ini harus tetap sasaran sehingga upaya mengingatkan kesejahteraan dan kompetensi guru berjalan dengan apa yang diharapkan kita bersama. Sebab ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan berkualitas guna melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Komisi X DPR berkomitmen mengawal pelaksanaan program ini, kami akan mengawasi agar bantuan-

bantuan pemerintah untuk tenaga pendidik benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Dan dirinya juga memberikan pujian yang tinggi atas keputusan Presiden Prabowo yang mengubah sistem pencairan tunjangan menjadi langsung ke rekening masing-masing guru. Menurutnya ini sebuah langkah yang mencerminkan upaya perbaikan tata kelola dengan prinsip transparansi dan efisiensi.

Dan dirinya juga menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para guru yang tidak pernah henti berjuang dan mengabdikan kepada negara. Berkat perjuangan dan dedikasi mereka pendidikan di Indonesia terus berjalan.

Dan dia juga berharap hari kemerdekaan RI ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk terus bersama-sama memperbaiki pendidikan di Tanah Air. “Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia, terima kasih para guru atas dedikasi dan pengabdiannya untuk bangsa dan negara. Kami ingin peringatan kemerdekaan RI tahun ini menjadi momentum semua pihak membangun kualitas pendidikan yang bermutu, khususnya hingga ke wilayah 3T,” ujarnya.

### **Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru**

Muhammadiyah juga memberikan apresiasi tinggi atas “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru” yang diluncurkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti.

Seperti disampaikan Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Didik Suhardi mengatakan bahwa kado tersebut

merupakan bentuk komitmen yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.

“Komitmen Pemerintah dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dan kesejahteraan guru sangat luar biasa dan signifikan. Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal memberi apresiasi setinggi-tingginya,” kata Didik Suhardi pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Ada tiga “Kado Presiden untuk Guru” dalam HUT ke-80 RI ini. Yaitu Insentif bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN), Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, dan Bantuan Afirmasi Kualifikasi S-1/D-4 Guru.

Menurut Didik, insentif bagi guru non-ASN sebagai bukti Pemerintah memerhatikan dan menempatkan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat sebagai mitra.

“Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat juga mendapatkan tempat yang sesuai yaitu sebagai partner. Walaupun di beberapa daerah masih terjadi kebijakan yang kurang pas,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa kado yang diberikan pemerintah kepada guru bentuk perhatian pemerintah kepada guru di seluruh Indonesia. Menurutnya guru adalah faktor utama dalam mencetak manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter.

“Pak Menteri sangat memahami bahwa guru merupakan faktor utama dalam rangka meningkatkan kualitas dan sumberdaya Indonesia. Semoga ini menjadi langkah signifikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia dalam rangka mempersiapkan Indonesia Emas 2045,” katanya.



# Kado untuk guru di HUT ke-80 RI

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) mengumumkan tiga program insentif bagi guru, Selasa (6/8), sebagai kado saat peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

## Manfaat program



Meningkatkan kesejahteraan guru.



Meningkatkan kinerja dan kompetensi guru.



Meningkatkan kualitas pembelajaran untuk kemajuan pendidikan.

## Insentif yang diberikan



Insentif guru honorer



Bantuan subsidi upah



Bantuan afirmasi kualifikasi S-1/D-4

### Besaran

Rp300.000 /bulan

Rp300.000 /bulan

Rp3 juta /semester untuk biaya pendidikan

### Penerima

341.248 guru dari berbagai jenjang

253.407 guru PAUD nonformal (kelompok bermain, taman penitipan anak dan sejenisnya)

12.500 guru PAUD dan SD yang belum memiliki gelar S1/D4.

### Penyaluran

Dibayarkan langsung 7 bulan ke rekening guru.

Dibayarkan langsung 2 bulan ke rekening guru.

Dibayarkan ke lembaga pendidikan untuk 2 semester.

### Keterangan:

Pencairan pada Agustus-September 2025.

Rekening dibuatkan oleh Kemdikdasmen dan diaktivasi oleh penerima.

Alokasi anggaran  
Rp905,5 miliar

Data Kemdikdasmen per 6 Agustus 2025 (angka pembulatan)



Insentif guru honorer  
Rp716 miliar

Bantuan subsidi upah  
Rp152 miliar

Bantuan afirmasi kualifikasi S-1/D-4  
Rp37,5 miliar

## Cara aktivasi rekening penerima

- 1 Pastikan status penerima dengan mengecek di Info GTK.
- 2 Datang ke bank yang ditunjuk.
- 3 Tunjukkan KTP, salinan surat keputusan penerima bantuan dan dokumen lainnya yang diminta.
- 4 Apabila proses verifikasi berhasil, rekening langsung diaktifkan.



Program-program tersebut merupakan terobosan pemerintah sekaligus kado Presiden Prabowo untuk para guru sebagai garda terdepan pendidikan.

**Abdul Mu'ti**  
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah





# DUKUNGAN EROPA PERCEPAT WUJUDKAN PERDAMAIAAN DI PALESTINA

**Negara –negara di Eropa mulai membuka diri dengan memberikan dukungan untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Dukungan tersebut semakin memperkuat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya.**

Israel semakin agresif dalam upayanya merebut dan mengusir rakyat Palestina dari wilayahnya. Serangan agresif tersebut bahkan dianggap melampaui batas kemanusiaan.

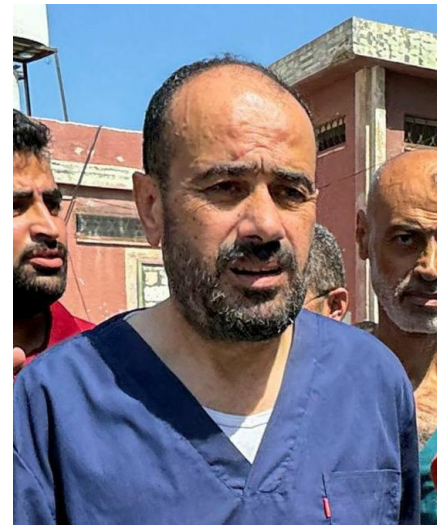
Korban jiwa pun berjatuhan, sehingga tanah Palestina tidak pernah kering dari darah para pejuang dan rakyat yang ingin mempertahankan wilayahnya dari gempuran Israel. Berdasarkan catatan yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Palestina pada 15 Mei 2025 mengungkapkan setidaknya sebanyak 53.010 warga

Palestina tewas dalam perang genosida Israel di Gaza sejak Oktober 2023.

Tidak hanya serangan militer, Israel juga melakukan blokade selama 11 Minggu di Gaza. Langkah tersebut menciptakan bencana kemanusiaan bagi warga Palestina mulai dari malnutrisi, kelaparan hingga pembunuhan. Sebab, tidak ada bantuan makanan yang masuk di wilayah tersebut.

Sulitnya akses mendapatkan bantuan makanan dari negara-negara lain membuat warga Palestina hanya





**Direktur Rumah Sakit Shifa di Kota Gaza,  
Dr. Mohammed Abu Salmiya**

mengakibatkan terjadinya malnutrisinya yang menewaskan anak-anak di Palestina. Seperti diungkapkan oleh Direktur Rumah Sakit Shifa di Kota Gaza, Dr. Mohammed Abu Salmiya, sebanyak 21 anak telah meninggal dunia akibat malnutrisi dan kelaparan di seluruh wilayah tersebut dalam 72 jam terakhir.

Dia juga mengungkapkan sekitar 900.000 anak di Gaza menderita kelaparan, serta 70.000 di antara mereka mengalami malnutrisi, ujarnya kepada BBC. Menurutnya puluhan ribu anak itu menghadapi angka kematian yang mengkhawatirkan.

Menurut Program Pangan Dunia (WFP) seluruh penduduk Gaza menghadapi kelaparan. “Malnutrisi melonjak. Sebanyak 90.000 perempuan dan anak-anak sangat membutuhkan perawatan. Hampir satu dari tiga orang tidak makan selama berhari-hari,” kata WFP dalam sebuah pernyataan pada Minggu (20/07).

“Bantuan pangan adalah satu-satunya cara bagi kebanyakan orang untuk mengakses makanan karena harga sekantong tepung terigu seberat satu kilogram telah melonjak menjadi lebih dari US\$100 (Rp1,6 juta) di pasar lokal,” tulis WFP dalam keterangan mereka.

bergantung kepada bantuan yang diberikan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) dukungan AS dan Israel yang kontroversial.

Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Thameen Al-Kheetan



**Thameen Al-Kheetan**

seperti dikutip BBC Indonesia pada 23 Juli 2025 mengungkapkan bahwa terjadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Israel. Dia mengatakan bahwa setidaknya lebih dari 1.000 warga Palestina telah dibunuh oleh militer Israel saat mencoba ingin mendapat bantuan dari GHF.

“Lebih dari 1.000 warga Palestina kini telah dibunuh oleh Israel saat mencoba mendapatkan makanan di Gaza sejak Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) mulai beroperasi pada 27 Mei,” kata Thameen Al-Kheetan.

Dia menjelaskan bahwa hingga 21 Juli 2025 setidaknya berdasarkan catatan sebanyak 1.054 orang tewas di Gaza saat berusaha mendapatkan makanan, 766 di antara mereka tewas di sekitar lokasi GHF, dan 288 di dekat konvoi bantuan PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya.

Aksi blokade tersebut juga

## Dukungan Internasional semakin kuat

Aksi brutal militer dan blokade bantuan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza merupakan tindakan di luar batas kemanusiaan. Sehingga aksi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan mendesak Israel untuk segera menghentikan perang terus disuarakan oleh masyarakat dunia.

Dukungan kemerdekaan bagi Palestina tidak hanya gencar disuarakan oleh negara-negara Islam. Aksi dukungan tersebut menggema di seluruh dunia sebagai wujud perlawanan terhadap kejahatan Israel.

Aksi demonstrasi melawan kejahatan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina digelar hampir seluruh benua. Misalnya ratusan ribu orang di berbagai kota besar di Eropa menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 15 Mei untuk memperingati Hari Nakba--hari ketika lebih dari 700.000 warga Palestina terusir dari tanah air mereka usai berdirinya Israel pada 1948.

Seperti dilansir Anadolu dan Al Jazeera, aksi protes itu juga menjadi bentuk kecaman atas serangan brutal Israel ke Jalur Gaza. Para aktivis mengatakan bahwa sejarah terulang kembali hari ini di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Di Stockholm, ribuan orang memadati Lapangan Odenplan atas undangan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Para demonstran membawa bendera Palestina, foto anak-anak korban serangan, dan spanduk bertuliskan "Hentikan genosida rezim Zionis di Palestina."

Sebagian peserta memegang poster bertuliskan nama-nama warga sipil yang tewas di Gaza untuk



(Dari kiri ke kanan) Tiga pejabat Pemerintah Irlandia, yakni Menteri Eamon Ryan, Perdana Menteri Simon Harris, dan Wakil Perdana Menteri Micheal Martin

menarik perhatian terhadap tragedi kemanusiaan yang masih berlangsung.

Pada April lalu, bentrokan terjadi antara polisi dan mahasiswa Pro-Palestina di Amerika Serikat yang menentang serangan Israel di Jalur Gaza. Polisi turun ke jalan dan melakukan aksi kekerasan untuk menghentikan protes yang meluas sejak penangkapan massal di Universitas Columbia sejak sepekan sebelumnya. Kericuhan dimulai antara polisi dan mahasiswa yang menentang perang Israel di Gaza pecah pada Kamis, 25 April 2024.

Dukungan untuk kemerdekaan Palestina juga disuarakan oleh masyarakat Jerman. Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh YouGov mengungkapkan sekitar 40 persen dari 2.295 responden di Jerman mendukung pengakuan Palestina sebagai negara merdeka. Dukungan ini terus meningkat seiring dengan tingginya jumlah korban sipil akibat serangan militer Israel di Jalur Gaza.

Masih menurut laporan yang

sama, sekitar 40 persen responden setuju bahwa Jerman harus mengakui Palestina sebagai negara merdeka, sementara 27 persen menentang dan 33 persen lainnya masih ragu-ragu.

## Dukungan Negara Eropa

Israel terus melanjutkan serangan militernya di Gaza sejak pejuang Hamas melancarkan serangan mendadak pada 7 Oktober 2023. Serangan ini telah mengakibatkan lebih dari 36.700 warga Palestina tewas, mayoritas adalah wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 83.500 orang lainnya.

Sebagian besar wilayah Gaza hancur lebur akibat aksi militer Israel dan blokade atas pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Oleh Mahkamah Internasional, Israel dinilai melakukan genosida.

Keputusan terbaru Mahkamah Internasional itu memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari



perlindungan dari perang sebelum kota itu diserang pada 6 Mei. Dengan situasi yang semakin memanas, dukungan internasional untuk pengakuan Palestina sebagai negara merdeka terus meningkat, mencerminkan keprihatinan global terhadap konflik berkepanjangan ini.

Dukungan kemerdekaan untuk Palestina ramai-ramai diberikan oleh negara di kawasan Eropa. Terbaru ada tiga negara di kawasan Eropa yang mengakui kemerdekaan Palestina yakni Spanyol, Norwegi dan Irlandia. Dengan pengakuan ketiga negara ini, total ada 11 negara Eropa yang telah mengakui kemerdekaan Palestina.

Berikut negara-negara Eropa yang mengakui Palestina: Swedia, Siprus, Hungaria, Republik Ceko, Polandia, Slovakia, Rumania, dan Bulgaria merupakan delapan dari 27 negara Uni Eropa yang telah mengakui Palestina sebelum Irlandia, Spanyol, dan Norwegia.

Terbaru, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah blak-blakan bahwa negaranya sangat siap mengakui Palestina merdeka. Padahal, selama ini, Prancis merupakan salah satu negara sekutu Israel dan sempat mendukung agresi Tel Aviv ke Jalur Gaza di awal operasi militer berlangsung 7 Oktober 2023.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.

“Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara



Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

Selain negara-negara Eropa, sejumlah negara lain juga sudah memberikan pengakuannya atas kemerdekaan Palestina. Total ada 143 negara, termasuk negara-negara Eropa, yang telah mengakui Palestina. Dikutip Al Jazeera, Kebanyakan mereka adalah negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Di antara negara tersebut yaitu Afghanistan, Argentina, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Brasil, Brunei, Burkina Faso, Chile, Kamboja, Kuba, Ekuador, Georgia, India, Indonesia, Iran, Irak, Yordania, Kenya, Libya, Lebanon, Malaysia, Meksiko, Kolombia, Vatikan, Thailand, Papua Nugini, Turki, China,

Rusia, Ukraina, hingga Korea Utara.

Sementara itu, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan kebanyakan negara-negara Eropa Barat masih bersikukuh tak mau mengakui Palestina.

### **Dukungan Prancis angin segar bagi Palestina**

Keputusan pemerintah Prancis yang akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyita perhatian. Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah menilai sikap terbaru dari Prancis itu bisa membawa angin segar dalam upaya diplomasi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.



“Walaupun sikap Perancis ini masih sebatas lisan, namun patut dihargai oleh pemerintah Indonesia dan DPR Indonesia, guna saling berkomunikasi dengan mitra mereka masing-masing di Perancis,” kata Rezasyah seperti dilansir detik.com.

Sikap dari Prancis ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Uni Eropa untuk bersikap lebih adil dalam memandang masalah di Palestina. Bagi pemerintah Indonesia, dukungan lisan dari Prancis ini juga harus direspons dengan cepat dalam membangun komunikasi dengan sejumlah aliansi.

Dia pun menilai pengakuan Prancis terhadap negara Palestina menjadi kekuatan moral bagi pemerintah Indonesia dalam melobi negara-negara

lain untuk mengambil sikap serupa.

“Diharapkan Indonesia mampu berkinerja dengan OKI, GNB, Liga Arab, dan Kerjasama Selatan-Selatan, guna menjadikan sikap Perancis ini sebagai kekuatan moral, untuk mendekati



**Teuku Rezasyah**

kelompok negara di Afrika yang pernah dijajah Perancis, serta negara dan provinsi yang berbahasa Perancis di benua Eropa, benua Amerika, dan kawasan Pasifik Selatan guna turut mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Rezasyah.

“Termasuk juga, menggalang dukungan dari universitas dan masyarakat umum di banyak kawasan sekaligus, melalui berbagai kegiatan akademik dan sosial budaya,” sambungnya.

Menurut Rezasyah, Presiden Prabowo Subianto juga harus mengawal dukungan dari Prancis ini di forum internasional. Prabowo, kata Rezasyah, harus memasukkan isu kemerdekaan Palestina dalam



pidatonya di markas PBB pada September mendatang. “Presiden perlu secara tegas memasukkan pentingnya kemerdekaan Palestina bagi tercapainya perdamaian dunia, sebagaimana diidamkan oleh Piagam PBB,” ujarnya.

### **Dukungan Negara Eropa Pemantik Wujudkan Perdamaian**

Dukungan Negara Eropa untuk kemerdekaan Palestina disambut baik oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar.

Dan dia pun mengapresiasi sikap tiga negara di Eropa, yaitu Spanyol, Irlandia dan Norwegia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Menurutnya pengakuan negara-negara Eropa tersebut menjadi pemantik wujudkan perdamaian di Palestina.

“Saya dan segenap warga bangsa ini tentu mendukung dan mengapresiasi sikap 3 negara Eropa untuk (mengakui negara) Palestina. Dengan begitu potensi damai di sana menjadi semakin terbuka lebar,” katanya di Jakarta.

Menurutnya konflik antara Israel dan Palestina sudah melampaui batas kemanusiaan. Ia pun mendorong konflik tersebut segera diakhiri. “Saya kira tidak ada satupun negara maupun agama yang mau melegalkan konflik, tidak ada. Apalagi sampai melampaui batas kemanusiaan seperti di Gaza. Momentum dukungan ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mengakhiri konflik,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua MUI KH Anwar Iskandar. Dia mengatakan bahwa MUI menyambut positif arah baru politik global ini, yang menunjukkan semakin banyak negara Barat berani menyuarakan keadilan untuk Palestina.

Dia menyebutkan dukungan global



**KH Anwar Iskandar**

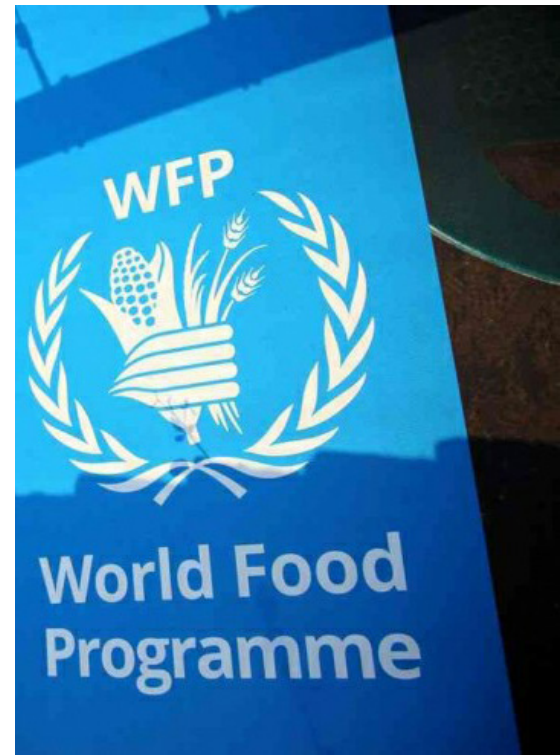
terhadap Palestina adalah sinyal positif dalam perjuangan rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Ia mengatakan, langkah sejumlah negara Eropa ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

“Mudah-mudahan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka akan berpidato di United Nations, di PBB, untuk memproklamkan dukungannya terhadap Free Palestine itu,” ucap Anwar dalam Milad ke-50 MUI di Asrama Haji, Jakarta Timur, seperti dikutip dari JawaPos.com Sabtu (26/7).

Selanjutnya dia menegaskan bahwa MUI sepenuhnya mendukung sikap Pemerintah Indonesia dalam membela Palestina.

“Lewat mimbar ini, saya ingin mengatakan, tidak ada kata lain bagi Majelis Ulama untuk terus membersamai Presiden Republik Indonesia. Karena apa? Karena program-program itu dan sikap-sikap itu amat Islami. Sesuatu yang Islami harus didukung oleh ulama,” katanya.

MUI pun aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Palestina secara langsung, mulai dari makanan hingga kebutuhan dasar lainnya.



Dukungan MUI tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga nyata di lapangan. “MUI tidak pernah berhenti untuk menyuarakan sebuah dukungan yang tulus kepada perjuangan rakyat Palestina dengan cara apapun,” jelasnya.

KH Anwar mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat Palestina. Dan dia menegaskan kembali bahwa hal tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia.

“Kita harus menunjukkan sikap yang manusiawi terhadap sesama dan apa yang menjadi sikap kita ini selaras dan sejalan dengan sikap pemerintah kita, pemerintah luar negeri kita, menteri luar negeri kita, dalam rangka melaksanakan salah satu tujuan daripada kemerdekaan negara Republik Indonesia,” tegasnya.



**PERANG DEMI PERDAMAIAN:**

# IRONI TIMUR TENGAH YANG TERUS TERULANG

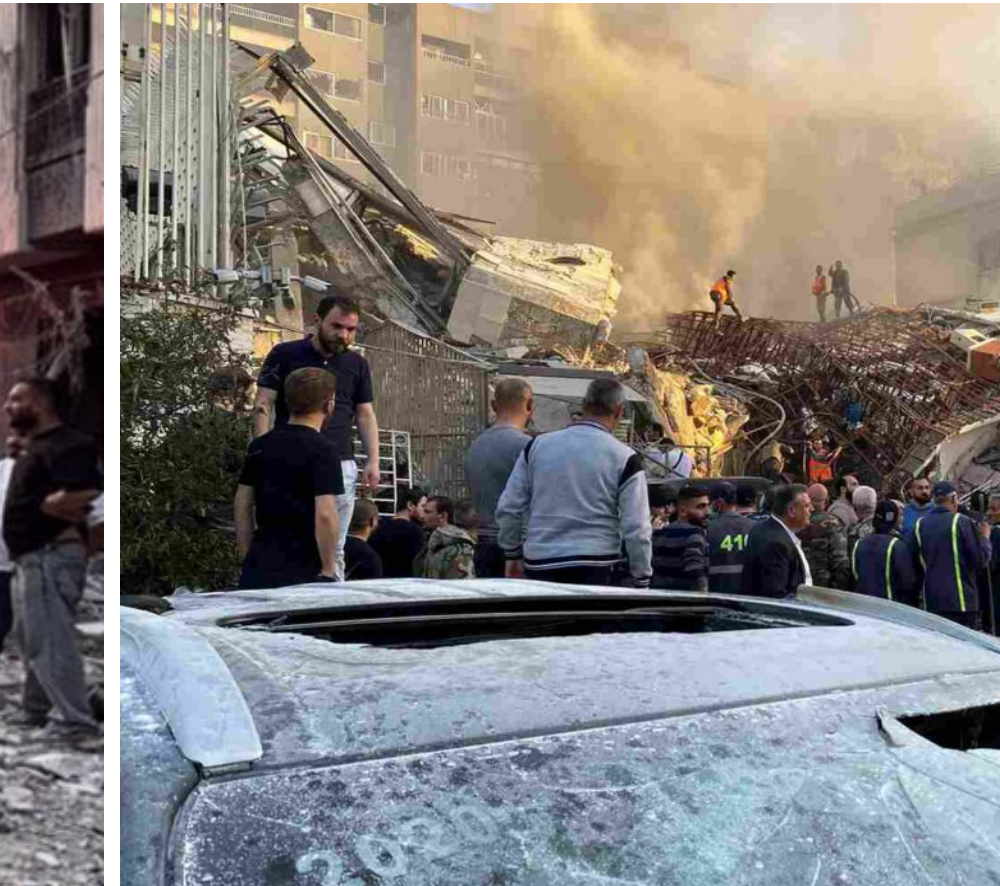
**P**erang antara Israel dan Iran yang meletus pada pertengahan Juni 2025 telah menjadi salah satu konflik paling intens dan berdampak luas di Timur Tengah dalam dekade terakhir. Dalam waktu hanya dua belas hari, dunia menyaksikan eskalasi militer yang melibatkan serangan udara,

rudal balistik, drone, dan bahkan keterlibatan langsung Amerika Serikat. Konflik ini bukan hanya soal dua negara yang saling menyerang, tetapi juga mencerminkan ketegangan geopolitik yang lebih dalam, menyangkut program nuklir, aliansi regional, dan keseimbangan kekuatan global.

Perang dimulai pada 13 Juni

ketika Israel melancarkan serangan mendadak terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran. Serangan tersebut menewaskan lebih dari seribu orang, termasuk sejumlah komandan militer senior dan ilmuwan nuklir Iran. Pemerintah Israel menyatakan bahwa operasi tersebut bertujuan untuk “menghancurkan ancaman





eksistensial” dari program nuklir Iran. “Kami telah mencapai seluruh tujuan Operasi Rising Lion dan bahkan lebih,” ujar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pernyataan resmi yang dirilis pada 24 Juni.

Iran tidak tinggal diam. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Teheran membalas dengan meluncurkan lebih dari 550 rudal balistik dan 1.000 drone ke berbagai wilayah Israel. Menteri Pertahanan Iran, Brigjen Aziz Nassirzadeh, mengatakan bahwa rudal-rudal yang digunakan dalam perang tersebut adalah produksi lama. “Hari ini, kami telah memproduksi dan memiliki rudal-rudal dengan kemampuan yang jauh lebih hebat daripada rudal-rudal sebelumnya,

dan jika musuh Zionis memulai petualangannya lagi, kami pasti akan menggunakannya,” tegas Nassirzadeh dalam konferensi pers di Teheran.

Serangan balasan Iran berhasil menghantam sejumlah pangkalan militer Israel, termasuk Tel Nof di pusat negara itu. Menurut analisis radar dan citra satelit yang dipublikasikan oleh akademisi dari Oregon State University, enam rudal Iran menghantam lima pangkalan militer Israel secara langsung. Meskipun sistem pertahanan udara Israel seperti Iron Dome, Arrow, dan Patriot dikerahkan penuh, hanya sekitar 40 persen rudal Iran yang berhasil dicegat pada hari-hari awal perang. “Pada hari-hari penghabisan perang, sebanyak 90 persen rudal Iran

sukses menghantam target,” klaim Nassirzadeh.

Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, turut terlibat dalam konflik. Pada 22 Juni, AS melancarkan serangan terhadap tiga fasilitas nuklir Iran. Sehari kemudian, Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di Qatar menggunakan lebih dari 30 rudal dan drone dalam operasi yang mereka sebut “Kabir Baik Kemenangan.” Keterlibatan langsung AS memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik ke negara-negara lain di kawasan, termasuk Irak dan Lebanon.

Di tengah eskalasi yang mengancam stabilitas regional, Presiden AS Donald Trump mengambil langkah diplomatik. Pada 24 Juni, Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk menghentikan permusuhan. “Gencatan senjata sudah berlaku,” tulis Trump di Truth Social, menyebut bahwa Iran akan menghentikan operasi militer secara sepihak mulai pukul 04.00 GMT, dan Israel akan mengikuti 12 jam kemudian. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyambut kesepakatan tersebut dengan menyatakan, “Hari ini kita menyaksikan berakhirnya perang yang dipicu oleh provokasi Israel, berkat perlawanan luar biasa bangsa kita yang telah mencatatkan sejarah”<sup>4</sup>.

Meski pertempuran telah berhenti, tidak ada kesepakatan formal yang meresmikan gencatan senjata. Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Reza Aref, menegaskan bahwa Teheran harus “siap setiap saat untuk konfrontasi.” Ia menambahkan, “Kita bahkan tidak berada dalam gencatan senjata; kita berada dalam penghentian permusuhan”. Pernyataan ini mencerminkan ketegangan yang masih membara di bawah permukaan,



dan potensi konflik lanjutan yang bisa meletus kapan saja.

Dampak perang terhadap ekonomi Israel sangat signifikan. Produk domestik bruto (PDB) Israel berkontraksi sebesar 3,5 persen pada kuartal kedua 2025, penurunan tajam yang belum pernah terjadi sejak akhir 2023. Belanja konsumen turun 4,1 persen, ekspor merosot 3,5 persen, dan investasi anjlok lebih dari 12 persen. “Perang 12 hari dengan Iran berdampak pada pengeluaran rumah tangga, sementara suku bunga tinggi dan penguatan mata uang shekel juga memberi tekanan pada ekonomi,” kata Ronen Menahem, kepala strategi pasar di Bank Mizrahi Tefahot.

Total kerugian ekonomi Israel akibat perang diperkirakan mencapai sekitar USD 6 miliar atau sekitar Rp99 triliun. Infrastruktur menjadi sektor

yang paling terpukul, dengan ratusan bangunan rusak dan aktivitas bisnis terhenti di banyak wilayah. Selain itu, perang memaksa pengerahan puluhan ribu pasukan cadangan, yang semakin membebani tenaga kerja dan anggaran negara.

Di sisi lain, Iran memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan kekuatan militernya. Pemerintah Teheran mengumumkan latihan militer besar-besaran yang menampilkan rudal jelajah jarak pendek dan menengah. “Dunia telah menyaksikan kemampuan rudal-rudal Iran yang menghantam target di Israel dengan sempurna,” ujar Nassirzadeh, menegaskan bahwa Iran tidak bergantung pada senjata dari luar negeri.

Perang Israel–Iran bukan hanya konflik bersenjata, tetapi juga

pertarungan naratif dan simbolik. Bagi Israel, ini adalah upaya untuk menegaskan dominasi dan mencegah ancaman nuklir. Bagi Iran, ini adalah pembuktian bahwa mereka mampu melawan kekuatan besar dan mempertahankan kedaulatan. Di tengah semua itu, rakyat sipil menjadi korban utama, dengan ribuan orang tewas, terluka, dan mengungsi.

Gencatan senjata yang diumumkan pada 24 Juni memberi harapan akan meredanya ketegangan, tetapi tanpa kesepakatan politik yang jelas dan komitmen diplomatik yang kuat, perdamaian tetap rapuh. Dunia kini menunggu apakah kedua negara akan memilih jalur negosiasi atau kembali ke medan perang yang telah menelan begitu banyak nyawa dan sumber daya.





@carapandangcom



## LUKA BARU DI PERBATASAN THAILAND-KAMBOJA

**D**alam beberapa bulan terakhir, konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja kembali mencuat ke permukaan, menandai babak baru dari sengketa yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada akhir Juli 2025, ketika bentrokan bersenjata pecah di sekitar wilayah Segitiga Zamrud, mencakup area bersejarah seperti Candi Ta Muen Thom dan daerah perbatasan antara Provinsi Ubon Ratchathani (Thailand) dan Oddar Meanchey (Kamboja).

Pertempuran tersebut menjadi yang paling brutal dalam satu dekade terakhir, melibatkan artileri berat, roket BM-21 Grad, jet tempur F-16, dan operasi darat berskala besar.

Menurut laporan dari Angkatan Darat Kerajaan Thailand, insiden bermula pada pagi hari tanggal 24 Juli, ketika pasukan mereka mendeteksi suara pesawat nirawak milik Kamboja di atas area candi. “Kami mendengar suara drone sekitar pukul 07.35, meskipun tidak terlihat secara visual,” ujar Letnan Jenderal Surasan Kongsiri dalam konferensi pers di Bangkok.

Beberapa saat kemudian, enam prajurit Kamboja bersenjata lengkap terlihat mendekati kawat berduri di depan pangkalan operasi Thailand. “Kami berteriak untuk menghindari konflik, namun mereka melepaskan tembakan,” lanjut Surasan.

Sebagai balasan, militer Thailand mengerahkan enam jet tempur F-16 untuk menyerang target militer Kamboja. Bentrokan ini menewaskan sedikitnya 43 orang, termasuk warga sipil, dan memaksa lebih dari 300.000 penduduk di kedua sisi perbatasan untuk mengungsi. Di pihak Thailand,



tercatat 15 orang tewas dan 46 lainnya terluka. Sementara di Kamboja, jumlah korban belum dipublikasikan secara rinci, namun laporan dari organisasi kemanusiaan menyebutkan bahwa skala pengungsian massal sangat besar.

Situasi semakin memburuk ketika pada 12 Agustus, seorang prajurit Thailand kehilangan kaki akibat ledakan ranjau di dekat Kuil Prasat Ta Muen Thom, Provinsi Surin. Militer Thailand menuding Kamboja menanam ranjau baru di wilayah sengketa, melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati pada 28 Juli. “Pihak Kamboja terus secara diam-diam menanam ranjau sebagai ancaman yang berkelanjutan,”

tegas Juru Bicara Angkatan Darat Thailand, Winthai Suvaree, dalam pernyataan tertulis.

Namun tuduhan tersebut dibantah keras oleh Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja. Mereka menyatakan bahwa ranjau yang meledak kemungkinan besar merupakan peninggalan konflik puluhan tahun lalu. “Kami tidak, dan tidak akan, menanam ranjau baru,” ujar juru bicara Otoritas Penanggulangan Ranjau dan Bantuan Korban Kamboja (CMAA), seperti dikutip dari The Guardian. Pemerintah Kamboja mencatat telah membersihkan lebih dari satu juta ranjau dan hampir tiga juta senjata tak meledak sejak tahun 1970.

Ledakan ranjau bukanlah satu-satunya insiden yang memperkeruh suasana. Dua hari sebelumnya, tiga prajurit Thailand terluka akibat ledakan serupa di Provinsi Sisaket. Seorang sersan mayor kehilangan kaki kiri, satu prajurit mengalami luka di lengan dan punggung, sementara satu lainnya mengalami gegar otak dan gendang telinga pecah. “Detail insiden sedang didokumentasikan dan akan dibahas di bawah Konvensi Ottawa,” kata Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai.

Konflik ini juga memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas ASEAN dalam menangani sengketa antar anggotanya. Meskipun organisasi regional tersebut menyerukan agar







kedua pihak menahan diri dan mencari solusi damai, prinsip non-intervensi yang dianut ASEAN membuat mereka tidak dapat bertindak tanpa izin dari negara yang bersangkutan. “Respons ASEAN yang sebatas mengingatkan untuk menahan diri belum cukup untuk meredakan ketegangan,” tulis seorang analis hubungan internasional dari Universitas Indonesia dalam sebuah artikel opini.

Dalam upaya meredakan konflik, Malaysia mengambil peran sebagai mediator. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memfasilitasi pertemuan antara pejabat pertahanan Thailand dan Kamboja di Kuala Lumpur, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan gencatan senjata tanpa syarat. Kesepakatan tersebut mulai berlaku pada 28 Juli dan diperpanjang pada 7 Agustus, meskipun kondisi di lapangan tetap rapuh. “Kami berharap

ini menjadi langkah awal menuju penyelesaian damai,” ujar Anwar dalam konferensi pers bersama.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga turut campur tangan, memperingatkan bahwa AS tidak akan menyepakati kesepakatan dagang dengan kedua negara jika pertempuran berlanjut. “Kami tidak akan berbisnis dengan negara yang tidak bisa menjaga perdamaian di wilayahnya,” kata Trump dalam pernyataan resmi dari Gedung Putih.

Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja bukanlah hal baru. Akar konflik ini dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial Prancis, ketika batas wilayah antara Thailand dan Indochina ditetapkan pada tahun 1904 dan 1907. Status kuil Preah Vihear, yang diserahkan kepada Kamboja berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional tahun 1962,

tetap menjadi sumber ketegangan. Wilayah sekitar kuil tersebut, termasuk Candi Ta Muen Thom, memiliki nilai strategis dan historis tinggi, serta kaya akan sumber daya alam.

Konflik terbaru ini menunjukkan bahwa sengketa perbatasan yang melibatkan warisan budaya dan kepentingan strategis dapat dengan cepat berubah menjadi perang bersenjata dengan dampak kemanusiaan yang parah. Gencatan senjata yang dicapai pada akhir Juli menjadi momen penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memberi peluang bagi solusi diplomatik. Namun, keberlanjutan perdamaian masih bergantung pada komitmen kedua negara untuk menahan diri, menghormati kesepakatan, dan mencari penyelesaian jangka panjang yang dapat mengakhiri siklus konflik berulang di perbatasan mereka.





## MENGUNCI PERBATASAN EKONOMI: STRATEGI TARIF DONALD TRUMP

**D**alam lanskap perdagangan global yang terus berubah, kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump kembali menjadi sorotan utama. Sejak menjabat kembali pada Januari 2025, Trump meluncurkan serangkaian kebijakan proteksionis yang bertujuan untuk “mengambil kembali kedaulatan ekonomi Amerika.” Kebijakan

ini bukan hanya mengubah arah hubungan dagang AS dengan dunia, tetapi juga memicu perdebatan sengit di dalam negeri dan di panggung internasional.

Pada awal April 2025, Trump mengumumkan dua kebijakan tarif utama: tarif universal sebesar 10% untuk semua barang impor ke AS, dan tarif resiprokal yang dikenakan terhadap negara-negara yang dianggap

memberlakukan hambatan dagang tidak adil terhadap Amerika. “Presiden Trump berupaya menyeimbangkan persaingan bagi bisnis dan pekerja Amerika dengan menghadapi kesenjangan tarif tidak adil dan hambatan non-tarif yang diberlakukan oleh negara lain,” tulis Gedung Putih dalam pernyataan resminya.

Langkah ini segera mengguncang pasar global. Negara-negara seperti

Country	Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
Peru	10%	10%
Nicaragua	36%	18%
Norway	30%	15%
Costa Rica	17%	10%
Jordan	40%	20%
Dominican Republic	10%	10%
United Arab Emirates	10%	10%
New Zealand	20%	10%
Argentina	10%	10%
Ecuador	12%	10%
Guatemala	10%	10%
Honduras	10%	10%
Madagascar	93%	47%
Myanmar (Burma)	88%	44%
Tunisia	55%	28%
Kazakhstan	54%	27%
Serbia	74%	37%
Egypt	10%	10%
Saudi Arabia	10%	10%
El Salvador	10%	10%
Côte d'Ivoire	41%	21%
Laos	95%	48%
Botswana	74%	37%
Trinidad and Tobago	12%	10%
Morocco	10%	10%

Brasil, Suriah, dan India dikenai tarif tinggi hingga 50%, sementara negara-negara yang berhasil menegosiasikan kesepakatan baru seperti Inggris, Jepang, dan Indonesia menerima tarif yang lebih rendah, berkisar antara 10% hingga 19%. Trump menyebut kebijakan ini sebagai “pengaturan ulang puluhan tahun kebijakan perdagangan yang gagal,” dan menegaskan bahwa “perintah hari ini menegaskan komitmen saya untuk mengambil kembali kedaulatan ekonomi Amerika.”

Namun, kebijakan ini tidak berhenti pada angka dan daftar negara. Pada Agustus 2025, Trump mengumumkan investigasi besar terhadap produk furnitur impor, terutama dari China dan Vietnam, yang menyumbang sekitar 60% dari total impor furnitur

AS. “Furnitur yang datang dari negara lain ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif dengan tarif yang belum ditentukan. Ini akan membawa kembali bisnis furnitur ke Carolina Utara, Carolina Selatan, Michigan, dan negara bagian di seluruh Amerika Serikat,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya<sup>4</sup>.

Langkah ini langsung berdampak pada pasar saham. Saham perusahaan seperti Wayfair, RH, dan Williams-Sonoma merosot tajam, sementara La-Z-Boy—yang sebagian besar manufakturnya berada di AS—justru naik. Industri furnitur AS sendiri tengah menghadapi tantangan berat, mulai dari penurunan permintaan akibat pasar perumahan yang lesu hingga tekanan inflasi yang membuat konsumen lebih selektif dalam

membelanjakan uang mereka.

Investigasi terhadap furnitur dilakukan di bawah payung hukum Section 232, yang memungkinkan pemerintah AS memberlakukan tarif atas dasar keamanan nasional. Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi bahwa investigasi ini akan rampung dalam 50 hari, meski Trump mengakui bahwa proses berbasis Section 232 biasanya memakan waktu lebih lama. Langkah ini juga dipandang sebagai strategi cadangan apabila pengadilan banding membatalkan tarif resiprokal yang sebelumnya diberlakukan Trump pada April, serta pajak impor terhadap China, Kanada, dan Meksiko pada Februari.

Di sisi fiskal, kebijakan tarif Trump memberikan dampak yang signifikan. Menurut data dari The Budget Lab Universitas Yale, tarif efektif rata-rata AS kini mencapai 18,6%, tertinggi sejak 1933. Pendapatan tarif melonjak menjadi USD 28 miliar pada Juni 2025, setara Rp451,2 triliun, tiga kali lipat dari pendapatan bulanan yang terlihat di 2024. S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit AS di AA+, menyebut tarif sebagai penopang fiskal di tengah pemotongan pajak besar-besaran oleh Trump. “Di tengah kenaikan tarif efektif, kami memperkirakan penerimaan tarif yang signifikan umumnya dapat mengimbangi pelemahan fiskal yang mungkin timbul dari legislasi fiskal terbaru,” kata S&P dalam pernyataannya<sup>6</sup>.

Namun, tidak semua pihak menyambut kebijakan ini dengan antusias. American Home Furnishings Alliance (AHFA), asosiasi industri berbasis di High Point, North Carolina, menyatakan bahwa “secara hukum, tidak ada hubungan rasional antara impor furnitur atau kayu dengan





keamanan nasional AS.” Mereka menambahkan bahwa “tarif tidak akan mampu mengembalikan industri furnitur AS ke level sebelumnya, malah berpotensi merugikan manufaktur yang masih bertahan di dalam negeri”.

Dampak kebijakan tarif juga dirasakan langsung oleh konsumen. Sony menaikkan harga konsol PS5 di AS sebesar 15% akibat tarif terhadap produk Jepang. Harga PlayStation 5 kini mencapai US\$549,99 atau sekitar Rp8,9 juta, sementara versi Digital Edition dibanderol US\$499,99 atau sekitar Rp8,1 juta. Microsoft dan Nintendo turut menyesuaikan harga produk mereka, dengan Microsoft menaikkan harga konsol sebesar US\$80–100 dan Nintendo menaikkan harga sejumlah aksesoris.

Di balik semua ini, Trump tetap teguh pada visinya. Dalam pidatonya di Rose Garden, Gedung Putih, ia

menyatakan, “Kami tidak akan lagi membiarkan negara lain mengambil keuntungan dari Amerika. Ini adalah era baru perdagangan yang adil dan timbal balik.” Pernyataan ini mencerminkan filosofi ekonomi nasionalis yang menjadi landasan kebijakan tarifnya: mengurangi defisit perdagangan, menghidupkan kembali industri dalam negeri, dan menekan dominasi negara lain dalam rantai pasokan global.

Namun, data menunjukkan bahwa hasil kebijakan ini tidak selalu sesuai harapan. Defisit perdagangan AS justru sempat melebar, mencapai rekor USD162 miliar pada Maret 2025, sebelum turun menjadi USD86 miliar pada bulan Juni. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan AS mengumpulkan pasokan terlebih dulu sebelum tarif diterapkan, sementara ekspor AS hanya mengalami

peningkatan kecil.

Kebijakan tarif impor Donald Trump adalah manifestasi dari strategi ekonomi yang berani dan kontroversial. Di satu sisi, ia berhasil meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat posisi fiskal AS. Di sisi lain, ia memicu ketegangan diplomatik, kenaikan harga konsumen, dan ketidakpastian pasar. Dengan investigasi baru terhadap furnitur dan produk strategis lainnya, serta ancaman tarif terhadap negara-negara yang tidak tunduk pada negosiasi bilateral, Trump menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur dari visinya.

Apakah kebijakan ini akan membawa kembali kejayaan industri Amerika, atau justru memperdalam jurang ketidakpastian ekonomi global? Jawabannya masih menggantung di udara, seperti furnitur yang menunggu nasibnya di pelabuhan-pelabuhan AS.

# PERSIAPKAN GENERASI UNGGUL INDONESIA MELALUI CKG SEKOLAH

**Selain pendidikan, Pemerintah Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus di bidang kesehatan. Melalui cek kesehatan gratis (CKG) sekolah sebanyak 53 juta pelajar akan diperiksa.**

Pemerintahan Presiden Prabowo terus berikhtiar mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia unggul. Hal ini sangat penting dalam rangka menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045.

Langkah yang dilakukan pemerintah tidak hanya memperhatikan dalam bidang pendidikan. Bidang kesehatan juga menjadi prioritas pemerintah-salah satunya melalui program cek kesehatan gratis (CKG).

Program ini sangat penting sebab kesehatan anak sekolah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi prestasi belajar dan perkembangan mereka. Salah satu upaya untuk menjaga kesehatan anak adalah melalui program cek kesehatan gratis yang sering dilakukan oleh sekolah bekerja sama dengan puskesmas atau pihak terkait.

Program ini memberikan berbagai manfaat, baik untuk anak, orang tua, maupun pihak sekolah.

Seperti disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Adita Irawati bahwa Program CKG Sekolah merupakan implementasi visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia unggul.

“CKG Sekolah merupakan investasi jangka panjang di sektor kesehatan bagi anak dan remaja,” kata Adita, Minggu, 3 Agustus 2025.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa CKG Sekolah merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. Program ini bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang mengedepankan upaya promotif dan preventif.

“Pemerintah ingin memastikan seluruh penduduk Indonesia sehat dan memperoleh akses layanan kesehatan,” kata Adita.

Sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025, CKG telah menjangkau 16.120.365 orang hingga 1 Agustus 2025. Adapun target total penerima manfaat CKG adalah 281 juta penduduk Indonesia.

## **CKG Sekolah Investasi Jangka Panjang**

Untuk mempercepat pelaksanaan program CKG pemerintah tidak hanya



**Adita Irawati, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan**

menyasar masyarakat umum, namun program tersebut juga menyasar ke sekolah. Dan program Cek kesehatan Gratis di Sekolah (CKG Sekolah) ini menargetkan 53 juta siswa dari tingkat dasar hingga menengah, mencakup sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah, pesantren, sekolah rakyat, dan sekolah luar biasa (SLB).

Sebanyak 53 juta pelajar akan mendapat pemeriksaan alias cek kesehatan gratis secara bergantian.

Program CKG Sekolah resmi diluncurkan pada Senin, 4 Agustus 2025. Peluncuran tersebut





berlangsung serentak di 12 lokasi sekolah/madrasah/pesantren yang tersebar di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang.

Diilansir dari website resmi Kementerian Kesehatan (Kemkes), Cek Kesehatan Gratis bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan fisik dan mental anak usia sekolah, sekaligus menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi kesehatan generasi muda Indonesia.

Seperti disampaikan Menteri

Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin bahwa program CKG Sekolah ini bukan hanya upaya medis, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Kesehatan anak-anak sekolah bukan hanya isu medis, tapi soal masa depan bangsa. Mereka adalah generasi penerus. Kalau kita ingin Indonesia maju, maka kita harus pastikan anak-anak kita sehat – fisik, mental, dan sosialnya,” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers di SMP Negeri 5 Kota Bandung, Senin 4 Agustus 2025.

Program ini mencakup berbagai

jenis pemeriksaan dasar, antara lain pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi dan penglihatan, serta skrining kesehatan mental. Selain peserta didik, para guru dan orang tua juga turut dilibatkan dalam kegiatan edukasi dan promosi gaya hidup sehat.

Salah satu jenis pemeriksaan dalam CKG Sekolah adalah pemeriksaan kesehatan jiwa. Menkes menekankan hal ini penting, mengingat selama ini deteksi dini terhadap gangguan mental anak masih belum optimal.

“Kita mulai ukur (tingkat) kecemasan, depresi, agar bisa



ditindaklanjuti lebih awal,” jelas Menkes.

Menkes juga mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

### **Persiapkan Generasi Unggul**

Di tempat terpisah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ( Mendikdasmen ) Abdul Mu'ti mengatakan bahwa CKG di sekolah merupakan ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam mempersiapkan generasi unggul Indonesia. Kesehatan merupakan investasi berharga bagi suatu bangsa.

Maka itu, sangat penting adanya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan generasi sehat sebagai bagian dari agenda besar menuju Indonesia Emas 2045.

Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,

sekaligus mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya Mendikdasmen menyampaikan program CKG Sekolah memiliki tujuan membangun kebiasaan dan budaya hidup sehat di kalangan anak-anak sejak dini. Menurutnya dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini maka masalah kesehatan anak dapat diketahui sejak dini.

“Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dimaksudkan sebagai usaha dari Bapak Presiden bersama dengan berbagai pihak Bapak Menteri Kesehatan sebagai leading utamanya dan kami Menteri pendidikan Menengah sebagai mitranya berusaha untuk bagaimana membangun kebiasaan hidup yang sehat dan juga budaya hidup yang sehat di kalangan anak-anak,” kata Abdul Mu'ti kepada wartawan saat kick off pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SDN 2 Cideng Pagi, Jakarta pada Senin (4/8/2025).

Ia menambahkan bahwa kesehatan anak tak lepas dari asupan makanan bergizi, dan oleh karena itu program makan gratis yang dirancang Presiden Prabowo merupakan langkah konkret untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

“Kita semua berusaha agar anak-anak ini sejak dini kita biarkan untuk makan makanan yang sehat dan bergizi dan tadi anak-anak sudah tahu apa makanan yang sehat apa makanan yang tidak sehat,” katanya.

### **Kolaborasi Lintas Sektor**

Program CKG Sekolah akan berjalan sukses jika dalam pelaksanaannya terjalin kolaborasi lintas sektoral yang solid. Maka itu dukungan dari pemerintah daerah sangat penting.

Program CKG Sekolah ini disambut dengan baik oleh seluruh pemerintah daerah. Seperti Provinsi Jawa Barat mengapresiasi program tersebut.

Seperti disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan program ini sangat dibutuhkan oleh siswa. Sebab, kesehatan menjadi salah satu kunci penting dalam mempersiapkan generasi unggul Indonesia.

Saat menghadiri Peluncuran CKG Sekolah di SMP Negeri 5 Kota Bandung pada Senin 4 Agustus 2025 dia mengatakan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis akan menjangkau lebih dari 8,6 juta siswa di Jawa Barat.

Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan awal terhadap 14 siswa yang telah diperiksa, ditemukan bahwa 9 diantaranya mengalami gangguan kesehatan mata.

“Ini menjadi perhatian serius. Nantinya, Dinas Kesehatan akan mengklasifikasikan kondisi sekolah ke dalam zona merah, kuning, dan hijau. Sekolah yang masuk zona merah harus mendapat perhatian khusus, mulai



dari penguatan hingga pemantauan intensif dari Puskesmas terdekat,” ujar Wakil Gubernur Jawa Barat.

Selanjutnya dia mengatakan bagi sekolah di zona kuning harus tetap dibina agar tidak jatuh ke zona merah, sedangkan sekolah di zona hijau harus mampu mempertahankan kondisinya.

“Jangan sampai tahun depan ketika pemeriksaan diulang, statusnya berubah jadi kuning atau bahkan merah. Kami dari pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan ini,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), khususnya di bidang kesehatan anak.

Selanjutnya dia menuturkan bahwa data yang diperlukan akan dihimpun dari berbagai instansi, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Kementerian Sosial (Kemensos) dalam hal anak-anak yang mengalami kekurangan gizi akibat persoalan sosial.

Selain itu, keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga dinilai krusial. “Semua pihak harus bersinergi. Data ini nantinya tidak hanya dikumpulkan, tapi juga dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan agar kita benar-benar bisa memenuhi standar pelayanan minimum, terutama untuk anak-anak kita,” tambahnya.

### **DPR Mendukung**

Dukungan terhadap terhadap program CKG Sekolah ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco. Menurutnya program tersebut merupakan wujud nyata perhatian pemerintah dalam

mempersiapkan generasi Indonesia yang sehat sehingga siap menghadapi masa depan.

“Kami sebagai anak bangsa dalam program rakyat Republik Indonesia mendukung penuh program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.

Politisi Partai Gerindra ini menyambut baik antusiasme masyarakat yang memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis dari pemerintah tersebut, meski dinilainya saat awal kebijakan tersebut diluncurkan muncul skeptisisme publik.

Dia menyebut berdasarkan data yang diperolehnya tercatat ada 69 juta pengguna aplikasi SATUSEHAT Mobile yang telah memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis.

“Awal memang kami lihat pada enggak mau, tapi belakangan setelah sosialisasi, itu banyak yang menggunakan sampai dengan 69 juta,” katanya.

Ke depannya, dia berharap Program CKG dapat lebih banyak menjangkau penerima manfaat dari berbagai lapisan masyarakat di tanah air.

“Kami berharap bahwa Program Cek Kesehatan Gratis ini juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bertambah dari 69 juta (pengguna),” kata dia.

Dukungan yang lain juga disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto.

Dia mengatakan bahwa cek kesehatan gratis di sekolah bukan hanya bermanfaat untuk mendeteksi penyakit, tetapi juga mendidik anak hidup sehat, membantu orang tua, dan menjaga lingkungan sekolah tetap aman. Oleh karena itu, program ini

sebaiknya dilaksanakan secara rutin agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan berprestasi.

Dia pun sangat mendukung program ini yang juga mencakup pemeriksaan kesehatan mental di sekolah sangat penting dalam membentuk ketahanan jiwa anak-anak Indonesia.

“Kita sedang mempersiapkan generasi masa depan. Kesehatan fisik dan mental mereka harus menjadi prioritas. Jangan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi abaikan aspek psikologis anak bangsa,” ujar Edy dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.

Ia menekankan bahwa menjaga kesehatan mental anak sejak dini adalah bagian penting dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia 2045. Pasalnya anak-anak usia 7 hingga 18 tahun saat ini merupakan calon pemimpin bangsa ke depan.

Selanjutnya Politisi PDI Perjuangan ini juga menyambut baik dimasukkannya pemeriksaan kejiwaan dalam program CKG bagi pelajar dan menyebutnya sebagai langkah progresif. Tapi, ia menegaskan bahwa program ini harus dilanjutkan dengan tindakan intervensi, bukan hanya berhenti di tahap skrining.

Dia juga mengingatkan bahwa jumlah tenaga kesehatan jiwa masih sangat terbatas. Maka itu, dirinya mendorong optimalisasi peran kader kesehatan, perawat, dan dokter umum di layanan primer sebagai ujung tombak pelaksanaan program. Menurutnya tanpa adanya itu, maka hasil skrining tidak akan berdampak nyata.

“Mereka harus dipersiapkan untuk melakukan edukasi, pencegahan, pemeriksaan dini, hingga merujuk kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut,” katanya.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk anak sekolah dimulai, pemeriksaan CKG akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan.

## Apa Saja Jenis Pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis Anak Sekolah?

### SD (7-12 tahun)

- ✓ Status Gizi
- ✓ Merokok (Kelas 5-6)
- ✓ Mata
- ✓ Telinga
- ✓ Jiwa\*
- ✓ Tingkat Aktivitas Fisik (Kelas 4-6)
- ✓ Riwayat Imunisasi\* (kelas 1)
- ✓ Gigi
- ✓ Gula Darah
- ✓ Tuberkulosis\*
- ✓ Tekanan Darah
- ✓ Kesehatan Reproduksi (kelas 4-6)
- ✓ Hati (Hepatitis B)\*
- ✓ Diabetes Melitus\*

### SMP (13-15 tahun)

- ✓ Status Gizi
- ✓ Merokok\*
- ✓ Tingkat Aktivitas Fisik
- ✓ Tekanan Darah
- ✓ Anemia Remaja Putri (kelas 7)
- ✓ Riwayat Imunisasi HPV\* (putri kelas 9)
- ✓ Kesehatan Reproduksi\*
- ✓ Hati (Hepatitis B & C)
- ✓ Gula Darah (kelas 7)
- ✓ Telinga
- ✓ Talasemia\*
- ✓ Mata
- ✓ Tuberkulosis\*
- ✓ Gigi
- ✓ Jiwa\*

### SMA (16-17 tahun)

- ✓ Status Gizi
- ✓ Anemia (putri kelas 10)
- ✓ Telinga
- ✓ Merokok\*
- ✓ Tingkat Aktivitas Fisik
- ✓ Jiwa
- ✓ Tekanan Darah
- ✓ Gigi
- ✓ Gula Darah
- ✓ Mata
- ✓ Hati (Hepatitis B & C)
- ✓ Kesehatan Reproduksi\*
- ✓ Tuberkulosis\*
- ✓ Talasemia\*

Keterangan :

\*Skrining Kuesioner



# Manfaat Cek Kesehatan

## 1. Deteksi Dini Masalah Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan secara rutin membantu mendeteksi sejak dini berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, anemia, gizi kurang, hingga penyakit menular. Dengan deteksi dini, penanganan dapat dilakukan lebih cepat sehingga mencegah masalah yang lebih serius di kemudian hari.

## 2. Meningkatkan Kesadaran Kesehatan pada Anak

Melalui program ini, anak-anak belajar pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Mereka jadi terbiasa melakukan pemeriksaan secara berkala dan memahami bahwa kesehatan adalah modal utama untuk beraktivitas, termasuk belajar.

Edukasi ini akan membentuk kebiasaan baik sejak dini.

## 3. Membantu Orang Tua Menghemat Biaya

Bagi sebagian orang tua, biaya pemeriksaan kesehatan bisa menjadi beban. Program cek kesehatan gratis menjadi solusi karena memberikan layanan tanpa biaya tambahan.

Dengan begitu, orang tua dapat memastikan kondisi anak tetap sehat tanpa mengeluarkan biaya besar.

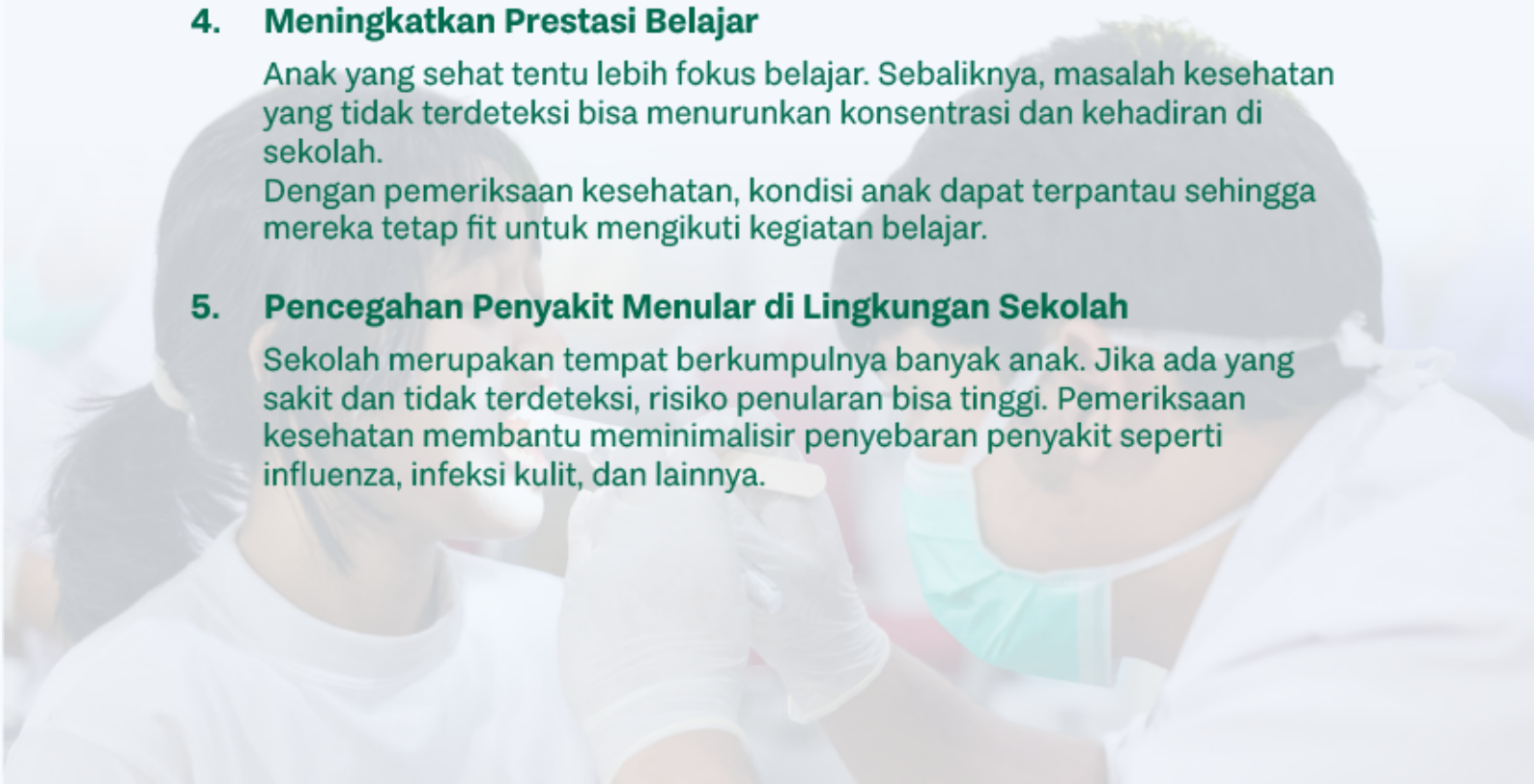
## 4. Meningkatkan Prestasi Belajar

Anak yang sehat tentu lebih fokus belajar. Sebaliknya, masalah kesehatan yang tidak terdeteksi bisa menurunkan konsentrasi dan kehadiran di sekolah.

Dengan pemeriksaan kesehatan, kondisi anak dapat terpantau sehingga mereka tetap fit untuk mengikuti kegiatan belajar.

## 5. Pencegahan Penyakit Menular di Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan tempat berkumpulnya banyak anak. Jika ada yang sakit dan tidak terdeteksi, risiko penularan bisa tinggi. Pemeriksaan kesehatan membantu meminimalisir penyebaran penyakit seperti influenza, infeksi kulit, dan lainnya.



**NADA YANG TAK DIBAYAR:**

# PERGULATAN MUSISI INDONESIA DALAM SISTEM ROYALTI

**I**su royalti musik di Indonesia kembali memanas. Di tengah semangat untuk menghargai karya cipta dan memperkuat ekosistem industri musik, justru muncul polemik yang memperlihatkan betapa kompleks dan belum tuntasnya sistem pengelolaan royalti di tanah air. Dari gugatan hukum, protes musisi, hingga kebijakan pemerintah yang baru, semuanya menyatu dalam satu narasi besar: bagaimana seharusnya hak pencipta lagu dan musisi dijaga, dihormati, dan dibayar secara adil?

Royalti musik, secara sederhana, adalah imbalan finansial yang diberikan kepada pencipta lagu, musisi, atau pemilik hak cipta atas pemanfaatan karya mereka. Di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini menegaskan bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Hak moral meliputi pengakuan sebagai pencipta, sementara hak ekonomi berkaitan dengan royalti yang harus diterima ketika karya digunakan secara komersial.

Namun, dalam praktiknya, sistem pengelolaan royalti di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Salah satu lembaga yang paling sering disebut dalam polemik ini adalah Wahana Musik Indonesia (WAMI), salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti. Baru-baru ini, musisi Tompi secara terbuka menyatakan mundur dari keanggotaan WAMI karena kecewa dengan sistem yang menurutnya tidak berpihak pada musisi. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya harus membayar royalti atas lagu ciptaannya sendiri yang ia nyanyikan di atas panggung. “Semua musisi ingin sejahtera, tapi jangan dimanfaatkan isu kesejahteraannya,” kata Tompi dalam sebuah festival jazz, menyoroti bagaimana isu kesejahteraan musisi sering dijadikan tameng, padahal sistemnya sendiri belum transparan dan adil.

Kritik terhadap WAMI bukan hanya datang dari Tompi. Ari Lasso, musisi senior Indonesia, juga sempat mengungkapkan bahwa ia hanya menerima royalti sekitar Rp400.000 dari lagu-lagu yang telah ia populerkan



**Adi Adrian**

selama bertahun-tahun. Ia bahkan meminta agar WAMI diaudit secara menyeluruh. “Kalau memang benar, kenapa harus takut?” ujarnya, mempertanyakan transparansi dan akurasi distribusi royalti.

Di sisi lain, WAMI membela diri dengan menyatakan bahwa mereka hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami ini adalah petugas yang diberi kewenangan. Tupoksi kami adalah



meng-*collect*,” kata Adi Adrian, President Director WAMI. Ia menegaskan bahwa WAMI tidak memiliki otoritas untuk mengubah aturan, melainkan hanya menjalankan mandat dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang menjadi payung hukum bagi seluruh LMK di Indonesia.

Polemik royalti tidak hanya terjadi di kalangan musisi, tetapi juga merambah ke dunia usaha. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah kasus Mie Gacoan Bali. Outlet makanan ini dilaporkan ke polisi karena memutar lagu tanpa membayar royalti. Setelah melalui proses mediasi, pihak Mie Gacoan akhirnya setuju membayar royalti sebesar Rp2,2 miliar untuk 65 gerainya, mencakup penggunaan lagu sejak 2022 hingga 2025. Kasus ini menjadi bukti bahwa pelanggaran hak cipta bukanlah hal sepele, dan bisa berujung pada konsekuensi hukum yang serius.

Tak berhenti di situ, isu royalti juga menyentuh ranah pernikahan. WAMI menegaskan bahwa pemutaran musik di acara pernikahan termasuk dalam objek pembayaran royalti. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Menurut WAMI, aturan ini berlaku untuk musik live yang tidak menjual tiket, dengan tarif sebesar 2% dari biaya produksi musik. Royalti ini dibayarkan oleh penyelenggara acara dan kemudian disalurkan melalui LMKN kepada LMK, sebelum akhirnya sampai kepada pencipta lagu.

Di tengah semua polemik ini, pemerintah Indonesia mencoba mengambil langkah tegas. Pada Agustus 2025, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 27 Tahun 2025. Aturan ini memperkuat kewajiban pembayaran royalti bagi para pengusaha yang memanfaatkan



**Marcel Siahaan**

lagu atau musik di ruang publik yang bersifat komersial. Marcel Siahaan, Kepala Direktorat Hukum PAPPRI, menyatakan bahwa lisensi musik bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen penting untuk melindungi hak cipta. “Menggunakan musik secara komersial berarti juga menghargai hak pencipta,” tegasnya.

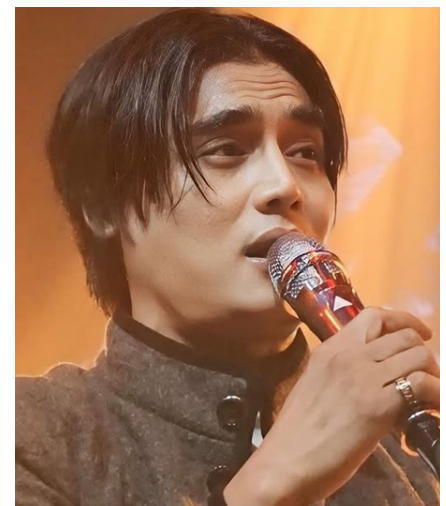
Permenkum 27/2025 juga menjelaskan jenis-jenis lisensi musik, yaitu lisensi pertunjukan publik untuk konser, restoran, atau hotel; lisensi siaran untuk televisi dan radio; serta lisensi digital untuk layanan streaming dan konten video. Dengan aturan ini, pemerintah berharap semua pihak di industri musik bisa mendapatkan haknya sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem musik Indonesia.

Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: apakah sistem ini benar-benar berpihak pada pencipta lagu dan musisi? Banyak pelaku seni merasa bahwa sistem royalti saat ini masih belum transparan, tidak efisien, dan cenderung merugikan mereka. Beberapa musisi bahkan memilih

untuk membebaskan lagu mereka dari kewajiban royalti, seperti Charly Van Houten dan Ari Lasso. Tapi WAMI tetap menagih royalti atas lagu-lagu tersebut, dengan alasan bahwa mereka hanya menjalankan aturan yang ada.

Di tengah semua ini, masyarakat pun ikut bingung. Apakah memutar lagu di warung kopi, salon, atau acara keluarga harus membayar royalti? Apakah menyanyikan lagu ciptaan sendiri di panggung harus membayar royalti? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa pemahaman publik tentang hak cipta dan royalti masih sangat terbatas. Sosialisasi dan edukasi menjadi kunci agar masyarakat bisa memahami pentingnya menghargai karya cipta, sekaligus mengetahui hak dan kewajiban mereka.

Royalti musik bukan hanya soal uang. Ia adalah bentuk penghargaan terhadap kreativitas, kerja keras, dan dedikasi para pencipta lagu dan musisi. Tanpa sistem yang adil dan transparan, industri musik akan kehilangan semangatnya. Musisi akan



**Charly Van Houten**



**Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat konferensi pers mendampingi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Rapat Komisi XIII, DPR RI, Kamis (21/8).**

enggan berkarya, pencipta lagu akan merasa tidak dihargai, dan masyarakat akan terus berada dalam kebingungan hukum.

Indonesia sedang berada di titik kritis. Di satu sisi, ada semangat untuk memperbaiki sistem royalti dan melindungi hak cipta. Di sisi lain, ada ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola dan ketidaktahuan publik yang masih tinggi. Jika tidak segera dibenahi, polemik ini bisa menjadi hambatan besar bagi perkembangan industri musik nasional.

Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk mereformasi sistem, transparansi dalam pengelolaan dana, dan edukasi yang menyeluruh kepada

masyarakat. Pemerintah, LMK, LMKN, musisi, dan pelaku usaha harus duduk bersama, mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, musik adalah bahasa universal yang menyatukan kita semua. Dan menghargai musik berarti menghargai para penciptanya.

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, akhirnya angkat bicara mengenai polemik royalti musik yang belakangan ini memicu keresahan di kalangan musisi, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan saat menghadiri acara kebudayaan di Depok, Jawa Barat, Fadli menegaskan bahwa aturan royalti

tidak boleh menjadi penghalang bagi ruang ekspresi musik di Indonesia. Ia menyampaikan dengan tegas, “Jangan sampai aturan royalti justru membunuh ruang ekspresi musik kita sendiri.”

Pernyataan tersebut muncul di tengah tren yang mengkhawatirkan: banyak kafe dan tempat usaha di Jakarta mulai enggan memutar lagu-lagu dalam negeri karena takut dikenakan biaya royalti yang dianggap memberatkan. Fadli menyebut fenomena ini sebagai alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan dialog terbuka. “Kita perlu cari solusi yang adil bagi semua pihak,” ujarnya, menekankan pentingnya





**Fadli Zon**

keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan keberlangsungan industri kreatif.

Menurut Fadli, kesalahpahaman tentang mekanisme royalti harus segera diatasi. Ia mengusulkan agar pemerintah, pelaku usaha, dan para pencipta lagu duduk satu meja untuk merumuskan kebijakan yang tidak

menghambat kreativitas maupun bisnis. “Tujuannya agar lagu-lagu Indonesia tetap berkumandang di ruang publik tanpa beban berlebihan,” jelasnya. Ia juga menekankan bahwa memajukan kebudayaan nasional bukan hanya soal melestarikan tradisi, tetapi juga memastikan karya seni modern seperti musik bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat.

Fadli menyatakan bahwa koordinasi lintas kementerian sangat penting dalam menyelesaikan isu ini. Ia menyebut Kementerian Hukum dan HAM sebagai regulator utama dalam urusan hak cipta, dan menyatakan kesiapan Kementerian Kebudayaan untuk menjadi jembatan antara para pemangku kepentingan. “Kami di Kemenbud siap memfasilitasi dialog dan mendengarkan aspirasi para musisi. Musik adalah bagian dari identitas bangsa, dan harus kita jaga bersama,” katanya.

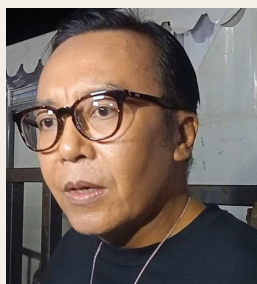
Dalam rapat yang dijadwalkan bersama DPR dan Kementerian Hukum, Fadli Zon juga akan hadir

untuk membahas skema pengenaan royalti, termasuk jenis acara dan tempat yang dikenakan biaya. Ia menyatakan bahwa aturan yang terlalu kaku bisa berdampak buruk pada ekosistem musik nasional. “Royalti itu penting, tapi jangan sampai jadi momok. Kita harus pastikan bahwa aturan ini berpihak pada pencipta, tapi juga tidak memberatkan pelaku usaha kecil,” tegasnya.

Pernyataan Fadli Zon mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama musisi yang selama ini merasa sistem royalti masih belum transparan dan adil. Langkah Kemenbud untuk membuka ruang dialog dianggap sebagai titik awal menuju reformasi sistem royalti yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan nada yang penuh empati, Fadli menutup pernyataannya, “Musik Indonesia harus terus hidup, harus terus didengar. Jangan biarkan aturan yang tidak bijak membuat kita kehilangan suara-suara terbaik bangsa.”

## Kata Mereka tentang Royalti Musik



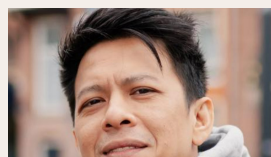
“Saya minta WAMI diaudit. Kalau memang benar, kenapa harus takut?”

**Ari Lasso**



“Saya harus bayar royalti untuk lagu saya sendiri yang saya nyanyikan di panggung. Ini lucu. Semua musisi ingin sejahtera, tapi jangan dimanfaatkan isu kesejahteraan.”

**Tompi**



“Sampai saat ini masih ada kegelisahan untuk penyanyi-penyanyi. Kami ingin meminta pernyataan lebih lagi dari pemerintah. Pembayaran royalti itu bukan tanggung jawab penyanyi, tapi EO.”

**Ariel Noah**



“Saya menghormati hak cipta, tapi semestinya ada ruang dialog agar karya bisa tetap hidup.”

**Once Mekel**



## PACU JALUR MENDUNIA

**G**emuruh sorak-sorai penonton pecah di tepian Sungai Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Ratusan pasang mata terpukau menyaksikan “Jalur” yaitu perahu panjang khas daerah Kuansing melaju deras, dipacu puluhan anak muda dengan irama dayungan yang padu. Inilah Pacu Jalur, tradisi yang bukan sekadar lomba perahu, melainkan pesta budaya yang mampu menyatukan ribuan orang. Tahun demi tahun, gaungnya makin nyaring terdengar,

bukan hanya di Indonesia, melainkan juga hingga ke mancanegara. Dari konten viral di TikTok, promosi wisata, hingga cerita para perantau, Pacu Jalur kini benar-benar mendunia.

### Sejarah Pacu Jalur

Pacu Jalur adalah pesta rakyat kebanggaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Sejarah Pacu Jalur berawal abad ke-17, di mana “Jalur” merupakan alat transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan, yakni daerah di sepanjang Sungai Kuantan

yang terletak antara Kecamatan Hulu Kuantan di bagian hulu hingga Kecamatan Cerenti Kecamatan Cerenti di hilir. Saat itu memang belum berkembang transportasi darat. Akibatnya jalur itu benar-benar digunakan sebagai alat angkut penting bagi warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi, seperti pisang dan tebu, serta berfungsi untuk mengangkut sekitar 40-60 orang. Kemudian muncul jalur-jalur yang diberi ukiran indah, seperti ukiran kepala ular, buaya,





atau harimau, baik di bagian lambung maupun selendang-nya, ditambah lagi dengan perlengkapan payung, tali-temali, selendang, tiang tengah (gulang-gulang) serta lambai-lambai (tempat juru mudi berdiri).

Perubahan tersebut sekaligus menandai perkembangan fungsi jalur menjadi tidak sekadar alat angkut, namun juga menunjukkan identitas sosial. Sebab, hanya penguasa wilayah, bangsawan, dan datuk-datuk saja yang mengendarai jalur berhias itu.

Baru pada 100 tahun kemudian, warga melihat sisi lain yang membuat keberadaan jalur itu menjadi semakin menarik, yakni dengan digelarnya acara lomba adu kecepatan antar jalur yang hingga saat ini dikenal dengan nama Pacu Jalur.

Pada awalnya, pacu jalur diselenggarakan di kampung-kampung di sepanjang Sungai Kuantan untuk memperingati hari besar Islam. Namun, seiring perkembangan zaman, akhirnya Pacu Jalur diadakan untuk

memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu Pacu Jalur diadakan sekitar bulan Agustus. Dapat digambarkan saat hari berlangsungnya Pacu Jalur, kota Jalur bagaikan lautan manusia. Terjadi kemacetan lalu lintas di mana-mana, dan masyarakat yang ada di perantauan akan terlihat lagi, mereka akan kembali hanya untuk menyaksikan acara ini.

Biasanya jalur yang mengikuti perlombaan, bisa mencapai lebih dari 100. Menurut masyarakat setempat jalur adalah 'perahu besar' terbuat dari kayu bulat tanpa sambungan dengan kapasitas 45-60 orang pendayung (anak pacu). Perlombaan yang konon sudah ada sejak tahun 1903 ini menjadi agenda tetap Pemerintah Provinsi Riau untuk menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke Riau, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada masa penjajahan Belanda pacu jalur diadakan untuk memeriahkan perayaan adat, kenduri rakyat dan untuk memperingati hari kelahiran ratu Belanda Wihelmina yang jatuh pada tanggal 31 Agustus. Kegiatan pacu jalur pada zaman Belanda di mulai pada tanggal 31 Agustus s/d 1 atau 2 September. Perayaan pacu jalur tersebut dilombakan selama 2-3 hari, tergantung pada jumlah jalur yang ikut pacu.

Kini warna warni kostum dan dentum suara meriam penanda mulai lomba, serta teriakan pemberi semangat menjadi daya tari budaya lokal asli Kuantan Singingi Riau yang pantas dinanti dan dinikmati.

### Suasana Festival Tahun Ini

Gubernur Riau, Abdul Wahid mengungkapkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan hadir dalam Festival



Pacu Jalur di Kuantan Singingi (Kuansing).

Sedangkan kedatangan Presiden Prabowo Subianto masih menunggu konfirmasi resmi. Selain pejabat negara, event ini akan dihadiri perwakilan duta-duta besar (dubes) dari sekitar 16 negara.

“Tadi sudah disampaikan bahwa tamu-tamu yang hadir bukan hanya tamu-tamu pejabat negara yang sudah konfirmasi, tetapi ada juga berbagai duta-duta besar dari sekitar 16 negara. Pak Wapres akan hadir, sedangkan Pak Presiden kita masih menunggu konfirmasinya,” kata Wahid, Jumat (15/8/2025).

Dia juga menyampaikan, berdasarkan rapat terakhir menunjukkan semua kendala yang sempat muncul sejak awal telah diatasi, sehingga rangkaian kegiatan Pacu Jalur siap digelar sesuai rencana.

“Kondisi persiapan checking terakhir, semua kendala-kendala dari awal sudah kita carikan solusinya. Pemasangan mulai dari tribun hingga pengamanan lokasi sudah kita rencanakan, bahkan dari acara pembukaan sampai penutupan sudah berjalan on the track termasuk tamu-tamu yang hadir,” ujarnya.

Abdul Wahid menambahkan, pemasangan tribun penonton hingga sistem pengamanan lokasi telah disusun matang. Agenda dari pembukaan hingga penutupan dipastikan akan berjalan sesuai jadwal.

Dijelaskan, untuk kenyamanan tamu, Pemprov Riau bersama panitia menyiapkan rest area di sejumlah titik strategis.

Jalur Pekanbaru-Taluk Kuantan akan memiliki titik singgah di Lipat Kain dan Singingi Hilir, sehingga wisatawan dapat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.



Pengaturan lalu lintas juga menjadi perhatian serius. Gubri Abdul Wahid menerangkan, Kapolda Riau telah menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengurai kemacetan selama pelaksanaan acara.

“Dengan begitu, tamu yang datang akan merasa lebih nyaman dan rileks dalam perjalanan menuju Kuansing,” terangnya.

Tak hanya itu, telah tersedia fasilitas khusus bagi tim peliputan dari media nasional, lokal, maupun internasional.

Bahkan, platform media sosial TikTok turut mengirimkan 10 influencer terbaiknya untuk meliput jalannya pertandingan, sebagai bagian dari promosi budaya Riau.

Sehingga, Gubri Abdul Wahid berharap Pacu Jalur dapat menjadi event budaya yang tertata rapi dan memberikan kenyamanan bagi penonton, baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan dari rumah.

“Untuk yang tidak dapat hadir, kami sudah siapkan live streaming agar masyarakat tetap bisa menikmati kemeriahan dari kotanya masing-masing,” tegas Gubernur.

### **Kekuatan Budaya dan Kebersamaan**

Nilai utama dari Pacu Jalur adalah gotong royong. Jalur bukan milik individu, melainkan hasil kerja kolektif satu desa atau kampung. Dari mencari kayu, mengukir, hingga melatih pendayung, semua dilakukan bersama-sama.

Para pendayung, yang sebagian besar anak muda, dilatih berbulan-bulan. Mereka harus memiliki stamina, kekompakan, dan disiplin tinggi. Sementara warga lain mendukung dengan menyediakan konsumsi, dana, hingga doa. Kebersamaan inilah yang membuat Pacu Jalur menjadi simbol solidaritas masyarakat Kuansing.

“Pacu Jalur itu bukan sekadar lomba, tapi jati diri kami. Semua orang terlibat, dari anak-anak sampai orang tua. Kalah atau menang, yang penting persaudaraan tetap terjaga,” ujar Mak Itam, seorang tokoh adat di Teluk Kuantan.

### **Pacu Jalur di Era Digital**

Di era media sosial, Pacu Jalur menemukan “panggung” baru. Jika dulu hanya bisa disaksikan di Tepian Narosa, kini siapa pun di belahan dunia



dapat menikmatinya lewat YouTube, Instagram, dan terutama TikTok.

Video jalur yang melaju cepat dengan teriakan penyemangat sering menjadi konten viral. Bahkan, musik latar khas Pacu Jalur kini sering dipakai sebagai background TikTok. Tidak sedikit influencer nasional dan internasional yang ikut membagikan pengalaman mereka datang ke Kuansing, sehingga gaung Pacu Jalur semakin luas.

Pemerintah Provinsi Riau juga memanfaatkan media digital untuk promosi. Melalui kampanye #PacuJalurMendunia, konten kreatif diproduksi dan disebar, mulai dari dokumentasi drone hingga testimoni wisatawan asing.

### **Pandangan Pemerintah dan Tokoh Budaya**

Bupati Kuantan Singingi, Abdul Wahid menyebut festival Pacu Jalur sebagai “jantung budaya Riau”. Ia menekankan bahwa tradisi ini bukan hanya hiburan, melainkan warisan yang harus dijaga bersama.

“Kami ingin Pacu Jalur tidak berhenti pada level lokal. Harapan kita, ia bisa menjadi atraksi budaya internasional, seperti dragon boat festival di China atau gondola race di Italia,” katanya dalam wawancara.

### **Dampak Ekonomi dan Wisata**

Tak bisa dipungkiri, Pacu Jalur memberi dampak besar pada perekonomian lokal. Selama festival berlangsung, perputaran uang meningkat signifikan. Pedagang makanan, pengrajin souvenir, hingga tukang parkir merasakan manfaatnya.

Data Dinas Pariwisata Kuansing mencatat, rata-rata 100 ribu wisatawan datang selama festival. Angka ini memberi sumbangan besar pada pendapatan daerah. UMKM juga

berkembang pesat.

“Kami bisa dapat keuntungan dua kali lipat dari biasanya,” kata Siti Rahma, pedagang lemang yang sudah 15 tahun berjualan setiap musim Pacu Jalur.

### **Pacu Jalur Daya Tarik Wisatawan**

Fenomena menarik adalah kehadiran wisatawan asing. Tahun ini, rombongan turis dari Malaysia, Singapura, bahkan Belanda terlihat antusias menyaksikan lomba. Sebagian dari mereka adalah keturunan Melayu yang ingin merasakan kembali tradisi serumpun.

Media asing pun mulai meliput. Beberapa kanal YouTube luar negeri menayangkan dokumentasi Pacu Jalur dengan judul “Indonesian Dragon Boat”. Meski istilahnya berbeda, esensinya sama: perahu panjang yang dipacu dengan penuh semangat.

Hal ini membuka peluang besar. Jika dikemas dengan baik, Pacu Jalur bisa menjadi destinasi wisata budaya kelas dunia, sejajar dengan Festival Songkran di Thailand atau Rio Carnival di Brasil.

### **Tantangan ke Depan**

Meski makin populer, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Kayu besar untuk membuat jalur kini semakin sulit didapat karena deforestasi. Di sisi lain, modernisasi juga menggeser minat generasi muda.

Namun pemerintah daerah sudah mengambil langkah. Beberapa Jalur kini dibuat dari kayu berkelanjutan, dan regenerasi pendayung terus didorong lewat pelatihan.

“Kalau kita tidak menjaga tradisi ini, bisa hilang ditelan zaman. Karena itu anak-anak muda harus diberi ruang,” kata seorang pelatih Jalur.

Pacu Jalur bukan sekadar perlombaan. Ia adalah warisan leluhur, identitas masyarakat Kuantan Singingi, dan aset bangsa Indonesia. Semakin ia mendunia, semakin besar pula tanggung jawab untuk melestarikannya.

Di era globalisasi, Pacu Jalur adalah bukti bahwa tradisi lokal mampu menembus batas dunia. Dari tepian Sungai Kuantan, riak dayungan para pemuda membawa pesan tentang kerja sama, kebersamaan, dan kebanggaan pada akar budaya sendiri.

### **Tentang Onjai, dan Mereka Yang Viral**

Salah satu elemen paling menarik dalam Pacu Jalur adalah tukang onjai. Ia berdiri di haluan jalur, menari dengan gerakan khas sambil memberi aba-aba ritme. Suara lantangannya memberi semangat kepada para pendayung, sementara gerakan tubuhnya seolah menjadi ikon visual.

Fenomena ini ternyata ikut viral di media sosial. Banyak video tukang onjai yang diunggah ke TikTok mencapai ratusan ribu bahkan jutaan penonton. Ditambah lagi dengan tarian anak-anak menirukan gaya onjai, Pacu Jalur makin mendapat atensi generasi muda.

“Kalau dulu orang mengidolakan pemain bola, sekarang anak-anak kami bercita-cita jadi tukang onjai,” kata salah satu orang tua sambil tertawa.

Musik dan yel-yel khas Pacu Jalur pun ramai dipakai sebagai tren di Instagram Reels. Anak muda membuat konten parodi, remix musik, bahkan cosplay tukang onjai. Fenomena ini membuktikan bahwa budaya tradisional bisa beradaptasi dengan tren modern.

### **Dikha, Penari Cilik Viral yang Jadi Duta Pariwisata Riau Berkat Pacu Jalur**

Aksi lincah seorang penari cilik asal Kuantan Singingi, Riau, bernama Dikha, belakangan ini mencuri perhatian publik. Lewat gerakan energik dan ekspresi polos khas anak-anak, ia tampil menari di sela-sela Festival Pacu Jalur, dan videonya mendadak viral di media sosial.

Rekaman penampilan Dikha tersebar luas di TikTok dan Instagram. Dengan kostum sederhana, ia menari mengikuti alunan musik Pacu Jalur, membuat penonton bersorak kagum. Netizen pun ramai memberikan pujian. Banyak yang menyebut penampilannya bukan hanya menghibur, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri dalam festival budaya kebanggaan Riau tersebut.

Fenomena viral itu tak berhenti di media sosial. Nama Dikha kini makin dikenal, bahkan hingga ke luar negeri. Popularitasnya dinilai ikut mengangkat pamor Pacu Jalur di kancah internasional. Melihat besarnya pengaruh tersebut, Pemerintah Provinsi Riau akhirnya menunjuk Dikha sebagai Duta Pariwisata Riau.

“Anak ini luar biasa. Dengan gayanya yang polos dan penuh semangat, ia berhasil membuat dunia luar penasaran dengan Pacu Jalur. Inilah bukti bahwa budaya lokal bisa mendunia lewat generasi muda,” ujar seorang pejabat Dinas Pariwisata Riau dalam keterangan pers.

Penunjukan Dikha sebagai Duta Pariwisata mendapat sambutan hangat masyarakat Kuantan Singingi. Banyak warga bangga karena ada representasi anak daerah yang mampu membawa nama tradisi Pacu Jalur hingga dikenal luas.

Orang tua Dikha mengaku tak

menyangka jika aksi sederhana anaknya bisa menjadi viral.

“Awalnya hanya ikut menari untuk memeriahkan acara. Tidak disangka ternyata banyak yang merekam dan membagikan. Alhamdulillah kalau akhirnya bisa bermanfaat untuk daerah,” ujar sang ibu dengan mata berbinar.

Fenomena Dikha juga memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi ruang baru promosi budaya lokal. Jika dulu Pacu Jalur hanya dikenal lewat cerita turun-temurun atau liputan media lokal, kini TikTok dan Instagram menjadi panggung global.

Dengan hadirnya sosok Dikha sebagai ikon baru, diharapkan Pacu Jalur semakin dikenal generasi muda. Selain menyajikan adu cepat perahu tradisional, festival ini kini juga menghadirkan daya tarik hiburan dari anak-anak yang kreatif.

Bagi masyarakat Riau, kehadiran Dikha bukan sekadar viral sesaat. Ia simbol bahwa tradisi Pacu Jalur mampu hidup dan bertransformasi seiring zaman, tanpa kehilangan akar budayanya.

### **Tukang Onjai, Nyawa Pacu Jalur yang Tak Bisa Hilang**

Di tengah hiruk-pikuk suara gendang, teriakan penonton, dan kayuhan puluhan pendayung di Sungai Kuantan, ada satu sosok yang tak kalah menyita perhatian. Ia berdiri di haluan Jalur, menari, melompat, dan berteriak memberi aba-aba. Sosok itu disebut tukang onjai atau dikenal juga dengan sebutan tukang tari timbo ruang.

Bagi masyarakat Kuansing, kehadiran tukang onjai bukan sekadar pelengkap. Ia adalah “nyawa” jalur. Tanpa tukang onjai, jalur tak akan dianggap sah bertanding. Aturan

resmi pun sudah jelas: setiap jalur yang turun di arena Pacu Jalur wajib memiliki tukang onjai dengan busana adat Melayu. Jika tidak, tim bisa didiskualifikasi.

### **Bukan Sekadar Menari**

Tugas utama tukang onjai memang tampak seperti menari. Ia bergerak lincah di atas perahu yang melaju deras, seolah tak peduli pada keseimbangan yang rawan goyah. Namun lebih dari itu, tukang onjai adalah komando semangat. Ia memberi aba-aba kepada pendayung, menyemangati dengan teriakan, sekaligus menjadi simbol estetika budaya.

“Onjai itu ibarat kapten yang berdiri di depan. Walaupun tak memegang dayung, dialah yang mengatur irama, menjaga kekompakan, dan menyalakan semangat pendayung,” kata Hendri, salah satu pelatih jalur asal Kuantan Mudik.

Gerakan tubuh tukang onjai seolah menyatu dengan dentuman gendang. Melompat ke kiri-kanan, menggoyangkan tangan, hingga berteriak lantang, semuanya dilakukan demi membakar motivasi. Tak jarang, aksi mereka mengundang sorak penonton yang terhibur.

### **Wajib Berbusana Melayu**

Aturan yang berlaku dalam Pacu Jalur mengharuskan tukang onjai memakai busana adat Melayu. Pilihan pakaian ini bukan tanpa alasan. Tradisi Pacu Jalur bukan hanya soal siapa yang tercepat, tetapi juga representasi budaya Melayu Riau.

Seorang anggota panitia menjelaskan, penggunaan busana adat adalah bentuk penghormatan pada akar budaya. “Kalau tukang onjai berpakaian bebas, maka hilanglah nuansa tradisinya. Ini bukan lomba



biasa, melainkan festival budaya. Jadi busana Melayu adalah kewajiban,” ujarnya.

Karena itu, panitia bisa mendiskualifikasi jalur yang tidak menampilkan tukang onjai atau tidak memenuhi aturan berpakaian. Keputusan ini sudah menjadi konsensus bersama tokoh adat, pemerintah daerah, dan masyarakat Kuansing.

### Simbol Kebersamaan

Peran tukang onjai bukan hanya teknis, tetapi juga filosofis. Dalam budaya Kuantan Singingi, kebersamaan adalah kunci. Tukang onjai menjadi simbol suara hati masyarakat yang mendorong para pendayung untuk pantang menyerah.

“Kalau pendayung itu otot, maka tukang onjai adalah jiwa,” ungkap Datuk Marzuki, seorang tokoh adat Kuansing. Menurutnya, tanpa tukang onjai, jalur ibarat perahu kosong tanpa semangat.

Keberadaan tukang onjai juga mengajarkan tentang keseimbangan. Ia berdiri di bagian paling depan jalur yang sempit, bergerak tanpa henti, tapi tetap menjaga harmoni dengan pendayung. Filosofi ini dianggap mencerminkan nilai kehidupan: kerja sama, keseimbangan, dan daya juang.

### Atraksi yang Memikat Penonton

Tak dapat dipungkiri, tukang onjai adalah salah satu daya tarik visual terbesar dalam Pacu Jalur. Banyak penonton datang bukan hanya untuk melihat adu cepat perahu, melainkan juga menikmati atraksi para tukang onjai.

Di era media sosial, aksi mereka kerap viral. Video tukang onjai yang menari heboh di ujung perahu sering diunggah ke TikTok dan Instagram,

lalu mendapat jutaan tayangan. Bahkan beberapa konten menjadikan gaya tukang onjai sebagai tren tarian baru yang ditirukan anak-anak.

Hal ini membuat Pacu Jalur semakin dikenal luas.

“Saya pertama kali tahu Pacu Jalur dari TikTok. Yang saya lihat justru tukang onjainya yang menari heboh. Dari situ saya jadi penasaran dan akhirnya datang langsung ke Kuansing,” kata Rudi, wisatawan asal Pekanbaru.

### Antara Seni dan Strategi

Meski terlihat seperti hiburan, tugas tukang onjai sejatinya sangat strategis. Ia harus tahu kapan memberi aba-aba untuk mempercepat kayuhan, kapan menenangkan pendayung, dan kapan membakar semangat di detik-detik terakhir.

Beberapa tukang onjai bahkan dianggap legenda karena mampu

membawa Jalur-nya sering juara.

“Kalau onjainya pandai, jalurnya bisa jadi juara. Kalau onjainya lemah, pendayung bisa kehilangan semangat,” ujar Syahril, mantan pendayung senior.

Latihan untuk menjadi tukang onjai pun tidak sembarangan. Mereka dilatih khusus, baik secara fisik maupun mental. Selain harus lincah, tukang onjai dituntut punya suara lantang, ekspresi kuat, dan stamina prima.

### Nilai Budaya yang Harus Dijaga

Kini, ketika Pacu Jalur semakin mendunia, peran tukang onjai semakin mendapat sorotan. Banyak wisatawan asing menganggap tukang onjai adalah keunikan yang tak ditemukan dalam lomba perahu tradisional di tempat lain.

Karena itu, pemerintah daerah dan tokoh adat menegaskan pentingnya menjaga aturan.

“Kalau tukang onjai dihilangkan, Pacu Jalur akan kehilangan rohnya. Itu sebabnya kami tegaskan, onjai wajib ada, wajib berbusana adat, dan wajib menjaga martabat tradisi,” kata panitia resmi Pacu Jalur.

Di balik gemuruh dayung dan riuh sorakan penonton, tukang onjai berdiri tegak di haluan jalur, menari dengan penuh semangat. Ia bukan sekadar penghibur, melainkan simbol kekompakan, identitas budaya, dan nyawa dari Pacu Jalur.

Aturan yang mewajibkan keberadaannya sekaligus mewajibkan busana adat Melayu bukanlah sekadar formalitas. Ia adalah wujud komitmen bahwa Pacu Jalur bukan sekadar lomba, melainkan warisan budaya yang harus terus dijaga.

Dan selama tukang onjai tetap berdiri di haluan, Pacu Jalur akan selalu hidup, bergema dari tepian Sungai Kuantan hingga mendunia.





## SEKOLAH RAKYAT, SOLUSI ATAU HANYA SEKEDAR AMBISI

**P**rogram Sekolah Rakyat (SR), yang resmi dimulai pada 14 Juli 2025, merupakan salah satu inisiatif pendidikan paling ambisius dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang khusus untuk menyediakan akses pendidikan gratis dalam bentuk sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin yang berisiko putus sekolah di jenjang SMP dan SMA.

Sekolah Rakyat adalah program sekolah berasrama yang tidak hanya menyediakan akses pendidikan formal layaknya sekolah negeri, tetapi juga menyediakan berbagai pelatihan untuk menghasilkan lulusan berprestasi.

Berbeda dengan sekolah konvensional, Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang diharapkan dapat menjamin kecukupan gizi bagi siswanya.

### **Sekolah Rakyat 2025**

Pendidikan adalah hak setiap anak yang wajib dijamin negara. Meskipun akses pendidikan terus diperluas, sejumlah anak dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam mencerdaskan bangsa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui



Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan membuka akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif bagi anak-anak yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan format.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang menyediakan layanan pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Selain bebas biaya pendidikan, program ini juga memberikan fasilitas lengkap seperti seragam, perlengkapan alat tulis, hingga makan siang setiap hari.

Dengan begitu, anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman dan fokus tanpa harus memikirkan beban ekonomi yang sering kali menjadi penghalang utama bagi mereka.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menyampaikan dukungannya penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang bertujuan memberikan pendidikan gratis dengan fasilitas asrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat ini, terdapat 53 lokasi yang siap menjalankan program tersebut dengan target mencapai minimal 200 titik pada tahun ajaran 2025/2026. Ini juga menunjukkan komitmen pemerintah yang serius dalam meningkatkan akses pendidikan, khususnya di wilayah yang selama ini sulit dijangkau akibat kendala geografis dan keterbatasan ekonomi.

Program Sekolah Rakyat secara khusus menargetkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tergolong dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dengan model pendidikan berasrama, anak-anak yang mengikuti program ini dapat tinggal di lingkungan yang aman dan kondusif selama masa



**Saifullah Yusuf**

belajar.

Hal ini sangat membantu mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi sulit, sehingga mereka dapat fokus dalam menimba ilmu tanpa gangguan dari luar.

Selain memberikan pendidikan akademik yang berkualitas, program ini juga berupaya mengembangkan karakter serta keterampilan hidup siswa.

Tujuannya agar mereka tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga mampu bersaing dan berkontribusi positif bagi masyarakat di masa depan.

Salah satu keunggulan utama Sekolah Rakyat adalah pendidikan yang diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya apapun, mulai dari biaya sekolah, seragam, buku pelajaran, hingga konsumsi harian selama bersekolah.

Hal ini tentu sangat meringankan beban keluarga yang selama ini kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghilangkan hambatan ekonomi



**Ujang Komarudin**

sebagai penghalang utama akses pendidikan.

Program ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sekolah formal yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap dengan lokasi yang dipilih secara cermat berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Selain itu, Kementerian Sosial menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Agama melalui nota kesepahaman (MoU) guna mendukung pelaksanaan program secara sinergis.

Kolaborasi ini memperkuat sumber daya dan kapasitas pelaksanaan serta memperluas jaringan Sekolah Rakyat sehingga dapat menjangkau beragam kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam keberhasilan program ini. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan dukungan penuh dengan menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung agar Sekolah Rakyat dapat berdiri dan beroperasi secara optimal di wilayahnya.

Ia menyebut program ini sebagai solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dari

lapisan masyarakat paling rentan.

Dukungan dari masyarakat serta lembaga sosial sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan optimal dan mampu menjangkau lebih banyak anak-anak di daerah terpencil maupun di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi maupun kesulitan geografis.

Lebih jauh lagi, program ini diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital yang menuntut pendidikan berkualitas dan keterampilan adaptif.

### **227 Ribu Anak Alami Putus Sekolah**

Pemerintah berencana memperluas cakupan program dengan menambah jumlah titik layanan serta meningkatkan kualitas fasilitas dan tenaga pengajar. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang ketat akan dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan efektif dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi anak-anak penerima manfaat.

Pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas.

“Program Sekolah Rakyat bukan program Kementerian Sosial, tapi program riil dari Bapak Presiden, yang diamanahkan kepada kami melalui



Inpres Nomor 8/2025. Jadi kami ini ibaratnya diminta untuk jadi tim kesebelasan. Owner kesebelasan ini Pak Presiden, kebetulan kami diminta jadi kapten tim kesebelasan itu,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, dalam media briefing bertema “Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat” di Balai Pers Nasional, Surakarta, Juli 2025.

Dalam forum yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tersebut, Robben mengungkap data mengejutkan. Yaitu sebanyak 227 ribu anak usia SD di Indonesia belum pernah sekolah atau putus sekolah. Angka ini melonjak drastis di jenjang SMP 499 ribu anak dan SMA 3,4 juta anak.

“Sebetulnya kesimpulannya kan pengangguran terselubung. Apa mungkin bisa bekerja tanpa punya ijazah SMA. Nah itulah yang kemudian ingin kita selesaikan,” tegas Robben.

Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi kedua di tingkat menengah, dengan 44,8 ribu anak usia SMP dan 464 ribu anak usia SMA tercatat tidak



**Robben Rico**

bersekolah.

Sebagai solusi atas krisis pendidikan ini, Sekolah Rakyat hadir dengan tiga prinsip utama. Yakni memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.

“Alhamdulillah dengan beroperasinya Sekolah Rakyat mereka menjadi punya harapan dan punya mimpi,” tambah Robben.

Format boarding school dipilih agar anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga



pembentukan karakter dan rasa percaya diri. Proses rekrutmen pun tidak konvensional.

Anak-anak dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dijemput langsung oleh tim pemerintah, bahkan dari daerah terpencil dan rumah tanpa listrik.

“Saya ke Katingan, Kalimantan Timur dan Maluku Utara untuk mencari anak-anak ini. Saya ajak bicara enggak ada yang berani lihat mata saya dan bisanya cuman nangis, malu. Padahal cita-citanya ingin jadi guru pendidikan agama Islam, (tapi) ibunya tidak mampu,” cerita Robben.

Per 14 Juli 2025, sebanyak 63 Sekolah Rakyat telah beroperasi. Sisanya, 37 sekolah akan dibuka pada akhir Juli atau awal Agustus, menjangkau total 100 lokasi di seluruh Indonesia. Distribusinya meliputi: Jawa 48 sekolah, Sumatera 22 sekolah, Sulawesi 15 sekolah, Bali 4 sekolah, Nusa Tenggara 4 sekolah, Kalimantan 4 sekolah, Maluku 4 sekolah, dan Papua 3 sekolah.

Total kapasitas saat ini mencapai 9.705 anak. Setiap siswa menerima seragam, sepatu, perlengkapan mandi, pembalut bagi siswi, makanan bergizi tiga kali sehari, serta pemeriksaan kesehatan dan talent mapping sejak hari pertama.

Pembelajaran di Sekolah Rakyat menggunakan teknologi terkini, seperti *Learning Management System* (LMS), *smartboard*, dan laptop. Kurikulumnya menggabungkan standar akademik nasional dengan penguatan karakter.

“100 (Sekolah Rakyat) ini teman-teman Kemensos sudah langsung koordinasikan dengan kami. Untuk Sleman dan Bantul itu 100 Mbps (kecepatan internetnya),” jelas Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto.



**Meutya Hafid**

Komdigi juga menyiapkan berbagai aplikasi penunjang, termasuk LMS, untuk mendukung sistem digitalisasi di sekolah. Lebih dari sekadar pendidikan, Sekolah Rakyat juga mencakup intervensi sosial menyeluruh. Rumah-rumah tidak layak milik orang tua siswa akan direnovasi, keluarga diberdayakan, dan lingkungan sekitar diperbaiki.

“Kita tidak selesaikan cuma rumahnya Naila, tapi 14 rumah tetangganya yang di kanan-kirinya,” ungkap Robben, merujuk pada salah satu contoh program di Makassar.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah program prioritas nasional yang harus dipahami dan dikawal oleh media.

“Kami dan tim selalu berusaha menjadi penengah bagi pemerintah maupun media, dan tentu tujuan utama agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujar Meutya. Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan masukan terhadap program pemerintah.

“Setiap program tidak mungkin hadir sempurna dari awal. Itulah fungsi media untuk menyampaikan atau menjadi ruang publik

memberi masukan kepada program pemerintah,” katanya.

### **Guru dan Siswa Mundur, Sekolah Rakyat Tetap Jalan**

Ratusan siswa dan guru sekolah rakyat resmi mengundurkan diri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan program sekolah rakyat tetap berjalan.

Gus Ipul, panggilan akrabnya, mengatakan pihaknya menghormati keputusan mundur dari para guru maupun siswa. Ia menegaskan hal tersebut tidak mengganggu jalannya program pendidikan berbasis inklusi dan bakat tersebut.

“Mereka yang mundur tidak lantas membuat proses berhenti. Alhamdulillah kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung di titik-titik yang sudah beroperasi,” kata Gus Ipul dalam Antara, Minggu (10/8/2025).

Diketahui, sebanyak 114 atau 1,4 persen dari keseluruhan 99.700 siswa resmi mengundurkan diri. Kemudian ada 143 guru sekolah rakyat yang memutuskan tidak mengajar di sekolah rakyat karena berbagai alasan.

Gus Ipul mengatakan guru yang mundur adalah yang telah lolos seleksi memilih mengundurkan diri sebelum menjalani penempatan.

“Kami tidak memaksa. Itu pilihan, dan kami hormati. Tapi kami juga siapkan pengganti,” ujarnya.

Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat bukanlah sekolah formal konvensional, melainkan tempat pembinaan berbasis potensi anak. Masyarakat diminta tidak menyamakan sistemnya dengan sekolah umum yang menggunakan standar akademik tinggi.

“Jadi saya mengajak teman-teman tidak berpikir ini sama seperti sekolah-sekolah umum ya. Karena ini tidak ada tes akademik, yang ada adalah



**Itje Chodidjah**

talent mapping melihat kemampuan anak sebagai pedoman para guru untuk membimbing siswa-siswa di sekolah rakyat. Dan kita juga masa matrikulasinya itu lebih lama daripada sekolah umum,” ucap Gus Ipul.

Untuk di ketahui pemerintah menargetkan pembukaan 40 Sekolah Rakyat pada Juli 2025 dan 160 sekolah pada Desember 2025. Program ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Papua.

Untuk melaksanakan program ini, pemerintah membutuhkan 1.554 guru yang akan direkrut melalui proses seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Rekrutmen siswa akan dimulai pada 1 April 2025, dengan tes psikologi, tes akademik, dan skrining kesehatan khusus untuk anak-anak dalam kategori desil 1, atau mereka yang berada dalam kemiskinan.

### **Tantangan dan Pandangan Terkait Sekolah Rakyat**

Di Papua, pelaksanaan Sekolah Rakyat menghadapi tantangan emosional yang signifikan. Seorang siswa di Papua mengungkapkan

kekhawatirannya jika mengikuti Sekolah Rakyat, yaitu orang tua. Dia mengaku tidak dapat meninggalkan orang tua sendirian di rumah.

“Orang tua saya sendirian di rumah, dan saya adalah harapan terakhir mereka untuk mendapatkan bantuan. Siapa yang akan merawat mereka?” tutur anak peserta Sekolah Rakyat di Papua mengutip laman Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kasus ini menggambarkan dilema yang dihadapi anak-anak dari daerah terpencil antara kesempatan pendidikan dan tanggung jawab keluarga.

Sementara itu, di Pulau Jawa, pengembangan Sekolah Rakyat sangat terkonsentrasi, memanfaatkan model revitalisasi aset yang ada. Model ini memanfaatkan infrastruktur pendidikan yang ada tetapi dimodifikasi agar sesuai dengan konsep sekolah berasrama.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), program ini telah menjadi prioritas utama mengingat tingginya angka kemiskinan dan putus sekolah di wilayah ini.

Program SR diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pendidikan antara Indonesia bagian timur dan barat.

Penerapan Sekolah Rakyat tentu saja menuai beragam tanggapan dari akademisi dan pakar pendidikan.

Dr. Itje Chodidjah, pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), mengkritik program tersebut sebagai kebijakan yang gegabah dan kurang riset.

“Sekolah Rakyat menciptakan segregasi sosial dan dapat berdampak signifikan pada psikologi anak,” tuturnya mengutip lama berita UMJ.

Kritik ini menyoroti potensi stigmatisasi terhadap anak-anak

miskin yang terpinggirkan dari sistem pendidikan arus utama.

Sementara itu, para ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) berpendapat bahwa program Sekolah Rakyat belum mendesak untuk diterapkan secara luas.

Mereka menyarankan, jika program ini diterapkan, sebaiknya diprioritaskan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang membutuhkan intervensi khusus.

Para ahli pendidikan juga mengkhawatirkan dampak psikologis pada anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka di usia dini.

Sistem sekolah berasrama berpotensi menimbulkan trauma perpisahan, terutama bagi anak-anak dari keluarga dengan ikatan emosional yang kuat.

Meskipun program telah dimulai, berbagai pihak menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Evaluasi ini harus mencakup aspek akademik, psikologis, dan sosial, serta dampak jangka panjangnya terhadap perkembangan anak.

Program ini juga perlu dibandingkan dengan alternatif kebijakan lain, seperti peningkatan kualitas sekolah negeri, program beasiswa, atau bantuan langsung tunai untuk pendidikan, yang mungkin lebih efektif dan kecil kemungkinannya menyebabkan segregasi sosial.

Sebagai terobosan dalam pendidikan gratis, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.

Namun, pelaksanaannya harus disertai dengan kajian menyeluruh mengenai dampak sosial dan psikologis, serta pemantauan yang ketat untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan.



# Sebaran 100 Titik Lokasi Sekolah Rakyat!

Kementerian Sosial mengumumkan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026 dimulai di 100 titik lokasi rintisan di seluruh Indonesia.

Dari 100 titik ini, 63 titik memulai pengenalan kepada siswa pada 14 Juli 2025 dan sebanyak 37 titik akan dimulai di akhir Juli 2025.

## Cek Sebaran Sekolah Rakyat

Keputusan Menteri Sosial RU Nomor: 126/HUK/2025

Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat menyatakan bahwa 100 titik lokasi Sekolah Rakyat diantaranya:



# PRESIDEN PRABOWO INGIN LEPAS DARI BAYANG-BAYANG JOKOWI



**A**mnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan abolisi bagi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang diberikan Presiden Prabowo Subianto itu sah, namun prosesnya sarat dengan nuansa politik dan potensi “barter kekuasaan”.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mendag RI) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp750

juta oleh hakim dalam kasus korupsi impor gula. Tom dijerat hukuman tersebut meski hakim menyebut ia tidak menikmati uang hasil korupsi.

Vonis hakim kepada Tom Lembong pun menuai kritik tajam. Putusan majelis hakim dinilai oleh publik telah mengoyak rasa keadilan dan publik pun semakin yakin bahwa Tom Lembong adalah korban dari kriminalisasi hukum di negeri ini.

Suara publik yang merasa janggal dengan putusan majelis hakim tersebut salah satunya disuarakan oleh

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Endriyo Susila. Putusan yang janggal ini menurutnya sangat mengejutkan.

Bahkan dia mengibaratkan putusan majelis hakim ini sebagai prognosis medis yang seharusnya berujung pada putusan bebas murni, namun kenyataannya justru mengesahkan hukuman penjara.

“Putusan pemidanaan terhadap Tom Lembong ini sangat mengejutkan. Meminjam istilah dari dunia kedokteran, prognosis kasus ini





**Endriyo Susila**

seharusnya berujung pada putusan bebas murni (*vrijspraak*), namun kenyataannya ketukan palu hakim justru untuk mengesahkan hukuman 4,5 tahun penjara untuk Tom,” katanya.

Menurut Endriyo, meski majelis hakim dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menganggap putusan ini tepat, reaksi negatif dari masyarakat yang hadir di persidangan, tokoh masyarakat, serta pegiat antikorupsi menunjukkan bahwa vonis tersebut tidak memenuhi, bahkan mengoyak rasa keadilan masyarakat (*public sense of justice*). Dan secara pribadi, dirinya pun tegas mengatakan menolak putusan tersebut. Dan vonis hakim majelis untuk Tom Lembong bentuk nyata dari kriminalisasi hukum.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Saat membaca pleidoi atau nota pembelaan Hasto atas tuntutan jaksa penuntut umum pada Kamis, 10 Juli 2025, Politisi PDI Perjuangan ini dengan tegas mengatakan bahwa kasus yang menjeratnya adalah rekayasa hukum dan kriminalisasi politik atas konsekuensi dari sikap politik yang ia ambil selama menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan.

Dalam pembelaannya, Hasto pun mengungkapkan kasus yang menimpanya merupakan daur ulang dari sikap politiknya, dimulai dari penolakan terhadap tim Israel dalam Piala Dunia U-17. Ia mengklaim proses ini dipengaruhi kepentingan politik kekuasaan yang terkait dengan Pemilu kada serentak 2024, dan ia sendiri menjadi korban intimidasi atas perjuangannya dalam demokrasi dan supremasi hukum.

Setelah menjalani proses persidangan yang panjang Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis penjara kepada Hasto selama 3 tahun 6 bulan. Selain itu, Hasto dibebankan dengan pidana denda sebesar Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan. Sementara Hasto lolos dari jeratan tindak pidana obstruction of justice karena dinyatakan tidak terbukti.

Majelis Hakim menjatuhkan vonis tersebut karena Hasto terbukti bersalah dalam perkara suap terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan calon legislatif Harun Masiku. Yakni dengan memberikan dana kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp400 juta.

### **Amnesti dan Abolisi Presiden Prabowo**

Di tengah gelombang publik yang menyuarakan keadilan untuk Tom Lembong dan Hasto Kristianto, Presiden Prabowo Subianto secara mengejutkan memberikan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kritianto dan abolisi bagi mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Tom Lembong.

Secara sederhana, abolisi adalah hak presiden untuk menghentikan proses hukum terhadap seseorang yang tengah menghadapi tuntutan pidana,



**Andi Agtas**

bahkan sebelum kasusnya diputus pengadilan. Sementara amnesti adalah pengampunan yang diberikan presiden untuk menghapus hukuman pidana yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan.

Keputusan Presiden tersebut diumumkan pada 31 Juli 2025. Dan pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi antara pemerintah, pimpinan DPR, dan seluruh fraksi. Dalam rapat tersebut, DPR juga menyetujui pemberian amnesti kepada 1.116 orang, termasuk Hasto.

Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, pertimbangan terkait pemberian abolisi dan amnesti itu untuk kepentingan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Supratman menepis pemberian abolisi dan amnesti itu karena respons Presiden Prabowo terhadap dinamika di publik yang terjadi atas kedua kasus ini. Perdebatan di publik terkait kegagalan Tom Lembong yang dinilai tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) dan Hasto yang disebut-sebut dijerat hukum karena alasan politik.



**M. Praswad Nugraha**

“Dari awal Bapak Presiden memang menginginkan karena beliau selalu berpikir tentang keutuhan NKRI, jadi beliau selalu menekankan tentang keutuhan dan kita harus betul-betul bersatu padu untuk membangun bangsa ini,” kata Supratman dalam konferensi pers di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat, 1 Agustus 2025.

Supratman menjelaskan bahwa hampir 99 persen data penerima amnesti berasal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas). Oleh karena itu, dia kembali menegaskan bahwa tidak ada niat dari Presiden memberikan amnesti atau abolisi kepada orang tertentu.

Selain itu dia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak mencampuri urusan proses hukum terkait pemberian amnesti dan abolisi tersebut. “Presiden punya pertimbangan bagaimana seluruh kekuatan politik itu bisa bersama-sama membangun republik ini. Apalagi sebentar lagi kita akan merayakan 80 tahun Indonesia merdeka,” katanya.

Dia mengatakan, Prabowo memiliki cita-cita rekonsiliasi nasional demi mencapai Indonesia emas tahun 2045,

di tengah tantangan global yang luar biasa.

### **Kritik Tajam Aktivistis Anti Korupsi**

Keputusan Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan abolisi bagi Tom Lembong menuai kritik tajam dari aktivis antikorupsi dan sebagian masyarakat sipil yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap integritas hukum dan agenda pemberantasan korupsi.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, meskipun pemberian abolisi dan amnesti dari presiden itu sah, prosesnya sarat dengan nuansa politik dan potensi “barter kekuasaan”.

Sementara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) memperingatkan langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bisa mencoreng independensi peradilan dan pemberantasan korupsi.

Kritik tajam atas keputusan Presiden Prabowo juga disampaikan oleh Mantan penyidik KPK Praswad Nugraha. Menurutnya amnesti bagi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto merupakan bentuk penyelundupan konstitusi.

Dia sangat kecewa terhadap putusan tersebut. Menurutnya amnesti tidak disalahgunakan untuk membebaskan pelaku tindakan pidana korupsi.

“Jika hal ini dibiarkan, kekhawatiran kami Presiden Prabowo Subianto rentan dituduh telah melakukan perbuatan tercela,” kata Praswad dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Menurut dia, seolah-olah undang-undang ihwal penggunaan amnesti dapat digunakan untuk membebaskan para koruptor. Praswad menilai presiden Prabowo tampak melindungi para pelaku korupsi yang dalam hal ini

memberikan amnesti kepada Hasto.

“Jalur amnesti masuk dalam kategori impunitas, menggunakan amnesti sebagai hak kekuasaan konstitusional yang melekat pada presiden untuk melindungi koruptor,” ucap dia.

Keputusan Presiden itu juga dipertanyakan oleh Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho. Menurutnya kasus yang menjerat Hasto dan Tom Lembong merupakan perkara korupsi yang tergolong sebagai kasus hukum. Karena itu, ia mempertanyakan keputusan Prabowo yang memberikan amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong.

“Kasus ini kan kasus hukum. Apakah ini kasus politik? Kalau iya, berarti suatu keputusan yang luar biasa oleh presiden. Harusnya besok-besok juga ada suatu bentuk yang lain kalau memang politik,” kata dia saat dihubungi Tempo pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Hibnu menjelaskan bahwa abolisi dan amnesti umumnya diberikan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan politik, karena memerlukan persetujuan dari DPR. Menurutnya, kasus korupsi seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum.

Jika ada keputusan pembebasan, kata dia, idealnya tetap ditempuh lewat mekanisme hukum. Meski begitu, ia tetap menghormati keputusan Presiden dan DPR tersebut karena merupakan bagian dari hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945.

### **Membangun Rekonsiliasi**

Keputusan Presiden Prabowo memberikan Amnesti bagi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong terbilang





**Hibnu Nugroho**

sangat mengejutkan. Pasalnya secara politik Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto adalah simbol dari kekuatan oposisi pemerintah.

Sehingga banyak kalangan memandangi Prabowo sedang membuka babak baru dalam konstelasi kekuasaan nasional dan konsekuensi politik yang signifikan. Salah satunya tentang kemandirian politik Prabowo di balik bayang-bayang Joko “Jokowi” Widodo.

Sejak awal, banyak kalangan menilai vonis terhadap Lembong bermuatan politis. Apalagi Lembong merupakan pendukung utama Anies Baswedan, rival utama Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Sementara itu, amnesti untuk Hasto, Sekjen PDI-P, menjadi sinyal politik yang tak kalah penting. PDI-P, yang idealnya menjadi partai oposisi setelah pasangan capres-cawapres yang diusungnya kalah dalam Pilpres, kini seolah mau dirangkul.

Prabowo tidak hanya memulihkan posisi Hasto secara hukum, tetapi juga membuka peluang rekonsiliasi yang lebih besar dengan partai yang sebelumnya berseberangan secara politis.



Sehingga keputusan Presiden Prabowo ini dibaca tidak hanya murni persoalan hukum, namun ini merupakan bagian dari langkah politik Ketua Umum Partai Gerindra ini menjauh dari Joko Widodo.

Prabowo terlihat sedang berupaya membangun poros kekuasaan yang baru dengan fondasi dan jejaring yang independen dari pengaruh lama. Sehingga ini semacam deklarasi politik penting. Presiden Prabowo menobatkan dirinya sebagai pemimpin dengan arah dan basis kekuasaan sendiri, bukan lagi penerus agenda Jokowi.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI),

Saiful Anam.

“Langkah ini menunjukkan bahwa Prabowo ingin lepas dari pengaruh Jokowi. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bayang-bayang atau kendali dari siapa pun, termasuk Jokowi,” ujar Saiful kepada wartawan, Senin, 4 Agustus 2025.

Keputusan Presiden Prabowo ini menurutnya cerminan karakter kepemimpinan yang mandiri dan tegas. Prabowo dinilai ingin menyudahi babak kelam politik masa lalu yang sarat dengan intimidasi dan kriminalisasi terhadap lawan-lawan politik.

“Ini adalah simbolik penyucian atas konflik dan tekanan politik yang terjadi di masa lalu. Prabowo sedang berupaya

‘melaspas’ membersihkan segala noda politik yang dianggap sebagai produk tekanan kekuasaan sebelumnya,” jelasnya.

Istilah melaspas berasal dari tradisi Hindu Bali, yang merupakan ritual penyucian bangunan baru atau yang baru dihuni kembali, dengan harapan membawa harmoni dan berkah. Saiful memaknai langkah Prabowo sebagai upaya penyembuhan politik nasional demi menciptakan ruang baru yang lebih damai.

Akademisi dari Universitas Sahid Jakarta itu juga menilai gaya kepemimpinan Prabowo sangat berbeda dengan pendahulunya. Bila Jokowi kerap menggunakan instrumen hukum untuk membungkam oposisi, Prabowo justru mengambil pendekatan sebaliknya.

“Prabowo lebih memilih jalan dialog dan rekonsiliasi. Dia tidak memusuhi pihak yang berbeda pandangan, tapi malah mengajak mereka bekerja sama. Ini pendekatan politik yang lebih inklusif dan sehat untuk menjaga keutuhan bangsa,” tutup Saiful.

### **Geng Solo Resah**

Keputusan Prabowo memberikan amnesti bagi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menimbulkan keresahan di kalangan Koalisi Indonesia Maju yang banyak diisi oleh loyalis Jokowi. Banyak dari mereka menempati posisi strategis di kabinet dan perusahaan plat merah.

Langkah Prabowo tersebut membuka kemungkinan perombakan kabinet besar-besaran dalam waktu dekat.

Ada beberapa alasan kuat mengapa loyalis Jokowi kemungkinan besar merasa resah. Pertama, ada



**Rocky Gerung**

risiko mereka tersingkir dari pusat kekuasaan. Jika Prabowo semakin memperluas basis politik di luar jaringan Jokowi, posisi politik para loyalis ini akan terancam.

Kedua, ini bisa menjadi preseden pembongkaran kasus-kasus kriminalisasi masa lalu dan kemungkinan pengusutan kasus-kasus korupsi yang di masa pemerintahan sebelumnya tidak disentuh. Abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto bisa membuka ruang revisi terhadap kebijakan-kebijakan hukum di era Jokowi yang dinilai tidak adil.

Ketiga, memunculkan ketidakpastian arah koalisi. Jika PDI-P—yang secara politik berseteru dengan Jokowi pasca-pilpres 2024—mulai didekati Prabowo, maka peta politik bisa berubah drastis. Akibatnya, loyalis Jokowi akan kehilangan posisi tawar.

Narasi keresahan geng Solo ini diungkapkan oleh pengamat politik Rocky Gerung. Menurutnya kebijakan Presiden Prabowo memberikan amnesti bagi Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong sarat makna politik.

Menurut Rocky, langkah Prabowo bukan semata-mata soal pembebasan

hukum, melainkan sinyal kuat untuk mengakhiri campur tangan politik dalam proses hukum yang selama ini dinilai penuh muatan dendam.

“Amnesti dan abolisi ini bukan soal hukum belaka. Ini adalah koreksi terhadap praktik kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai alat tukar tambah politik,” kata Rocky, dalam kanal YouTube-nya, (4/8/2025).

Dia pun menyoroti bahwa keputusan Prabowo juga bisa dibaca sebagai pilihan strategis untuk menentukan arah dukungan politik. Dia menilai relasi Prabowo lebih cenderung ke Megawati dibanding Jokowi, dan itu bisa terbaca dari peta koalisi dan respons publik.

Kedekatan Prabowo dan Megawati ini membuat geng Solo resah. Hal ini dapat terlihat dari sikap para buzzer yang biasanya mendukung Prabowo-Gibran tapi kini justru mengecam keputusan presiden menjadi indikasi ketakutan terhadap potensi ancaman terhadap kelangsungan dinasti Jokowi.

“Mereka mulai galau, karena langkah ini bisa membatalkan skenario 2029. Ada kecemasan soal masa depan Gibran. Jadi, sentimen itu terbaca sangat jelas,” katanya.

Rocky juga menilai bahwa keputusan Prabowo ini adalah ujian awal terhadap konsistensinya sebagai pemimpin. Bila di masa lalu hukum bisa digunakan untuk membungkam kritik, maka kini rakyat akan menuntut agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap aktivis yang bersuara.

“Jangan sampai aktivis yang mengungkap kasus ijazah palsu atau menggugat posisi Gibran justru dijerat lagi atas nama hukum. Kalau Prabowo sudah menolak campur tangan politik dalam hukum, itu harus berlaku untuk semua pihak, termasuk rezimnya sendiri,” tegas dia.



# TKA DAN IKHTIAR MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA

Upaya peningkatan mutu kualitas pendidikan di Indonesia tidak hentinya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Gebrakan terbaru yang dilakukan oleh Kemendikdasmen dalam mewujudkan upaya tersebut salah satunya melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).

TKA ini sangat perlu untuk dilakukan untuk melengkapi evaluasi penilaian yang sudah dilakukan selama ini. Seperti kita ketahui bahwa evaluasi penilaian siswa melalui dua jalur yakni Asesmen Nasional dan penilaian harian guru.

Hadirnya TKA ini justru menjadi pelengkap bukan mengganti yang sudah berjalan. Asesmen Nasional tetap dibutuhkan sebagai tolok ukur sistem tanpa membebani murid. Dan penilaian harian guru juga tetap dijalankan sehingga guru tetap memiliki kedaulatan dalam menilai dan menentukan kelulusan muridnya.

TKA yang tertuang dalam Peraturan Mendikdasmen (Permen) No. 9 Tahun 2025 merupakan ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengetahui bagaimana kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran di kelas. Sebab TKA ini memiliki tujuan untuk mengukur capaian akademik murid, khususnya pada mata pelajaran tertentu. Bagi Bagi jenjang SMA /sederat mata



pelajaran yang diujukan yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, bahasa Inggris dan 2 (dua) mata pelajaran pilihan.

Mendikdasmen RI, Prof. Abdul Mu'ti menyatakan telah siap mengadakan tes tersebut bagi peserta didik kelas 12 SMA/MA/ sederajat dan kelas akhir SMK/MAK pada akhir 2025 ini. Ia menyebut TKA pertama kali akan digelar pada November 2025. Maka kita harus dukung, inilah jalan yang tepat dalam rangka melihat kemampuan akademik siswa secara jujur berdasarkan standar nasional yang ditetapkan pemerintah.

### **Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa**

Tujuan dari pendidikan nasional adalah membentuk siswa yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing. Tidak hanya menanamkan nilai, daya saing juga ditekankan dalam menghadapi persaingan global sangat kompetitif.

Terkait mencetak siswa yang berkarakter dan berakhlak mulia hal ini bisa dibentuk dengan pembiasaan-pembiasaan di sekolah dengan menanamkan nilai-nilai agama dan moral. Dan tentunya ini juga akan berhasil jika pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah dilanjutkan dengan didikan orang tua dan lingkungan masyarakat.

Sekolah yang menanam, keluarga (orang tua) lah yang menyiram dengan penuh kasih sayang untuk menghasilkan generasi bangsa yang memiliki karakter yang kuat dan berakhlak mulia. Masyarakat juga memiliki peran penting sebagai tempat untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kepekaan sosial bagi anak-anak kita.

Sementara itu, untuk meningkatkan daya saing, tes kemampuan akademik (TKA) sangat diperlukan. Ini sejalan dengan amanat konstitusi yakni pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa evaluasi hasil belajar siswa dilakukan untuk memantau kemajuan belajar siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa evaluasi hasil belajar siswa harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan pada Permendikdasmen No. 9 Tahun 2025, Pasal 3 TKA bertujuan untuk; memperoleh informasi capaian akademik murid yang berstandar untuk keperluan seleksi akademik, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan nonformal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas dan memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Atas dasar ini, maka hadirnya TKA ini

mempertegas bahwa daya saing akan tercipta jika dalam proses pendidikan memiliki standar yang terukur sehingga mampu melihat secara jernih kemampuan akademik siswa.

Pasalnya, jika kita belajar dari sebelumnya, misalnya standar pemberian nilai raport di setiap satuan pendidikan memiliki standar yang berbeda-beda. Ada sekolah dengan mudah memberikan nilai tinggi kepada murid, dan sebaliknya. Sehingga ini sangat sulit untuk mengukur apakah nilai yang dicapai oleh siswa benar-benar menggambarkan kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran dan menerapkan konsep-konsep yang telah mereka dipelajari.

Selanjutnya, dengan hadirnya TKA ini juga membantu siswa dalam menentukan kesiapan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Pasalnya TKA dapat digunakan sebagai salah satu kriteria penerimaan siswa ke perguruan tinggi atau universitas tertentu.

Ini merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Sebab selama ini, standar nilai yang digunakan oleh perguruan tinggi tidak mencerminkan keadilan jika berpatokan pada nilai raport. Sebab, ada sekolah yang “mengobral” nilai dengan memberikan nilai sangat tinggi kepada siswa. Misalnya nilai 9 antara sekolah yang satu dengan yang lain berbeda dalam proses mendapatkannya. Ada siswa yang berjuang mati-matian untuk mendapat nilai tersebut, ada siswa yang mendapatkan nilai yang sama karena belas kasihan dari guru.

Maka itu TKA ini sangat perlu dalam melihat kualitas pendidikan Indonesia secara jujur dan transparan. Sehingga antara nilai yang siswa raih dan kemampuan benar-benar sejalan.

Sebab, untuk meningkatkan daya saing bangsa dibutuhkan kejujuran dalam menilai. Kejujuran bisa dicapai jika memiliki standar yang jelas dan transparan dalam proses penilaian. Maka, hadirnya TKA diharapkan akan menjadi motivasi bagi siswa agar lebih serius dalam belajar. Meski TKA bukan menjadi hakim tunggal untuk menentukan kelulusan, namun TKA akan menentukan jalan siswa dalam meraih masa



depan yang meraka cita-citakan.

### **Meningkatkan Kualitas Pendidikan**

Bangsa yang akan sukses dalam menghadapi persaingan global adalah bangsa yang benar-benar mempersiapkan diri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) warganya. Jalan yang harus ditempuh adalah melalui proses pendidikan yang berkualitas.

Bangsa yang tidak mempersiapkan diri dengan menghadirkan pendidikan yang berkualitas maka bersiap-bersiap akan hanya menjadi penonton dan objek dari persaingan global yang semakin berat. Melalui TKA inilah diharapkan menjadi jalan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Setidaknya ada lima alasan mengapa TKA berkorelasi dengan peningkatan kualitas pendidikan, Pertama; TKA menjadi evaluasi kemampuan siswa. Melalui tes kemampuan akademik ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membantu guru dan lembaga pendidikan mengevaluasi kemampuan akademis siswa, sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan para peserta didiknya.

Kedua: Pengembangan kurikulum. Hadirnya TKA ini sangat membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Berdasarkan hasil TKA ini bisa menjadi acuan sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Sehingga proses pembelajaran di sekolah benar-benar bermakna sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa.

Ketiga: Peningkatan kualitas pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Sehingga guru harus benar-benar memastikan apakah transfer ilmu pengetahuan selama proses belajar bisa diterima dengan baik atau tidak. Dengan adanya TKA inilah sangat membantu guru dalam memahami kemampuan siswa, sehingga guru paham metode pengajaran apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga bisa meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran di sekolah.

Keempat: Seleksi dan penempatan siswa; adanya TKA ini sangat membantu untuk



menentukan penempatan siswa yang tepat dalam program pendidikan, sehingga mereka dapat belajar di lingkungan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Dan terakhir, akuntabilitas pendidikan; TKA dapat membantu lembaga pendidikan meningkatkan akuntabilitas dengan mengevaluasi kemampuan siswa dan menentukan apakah mereka telah mencapai standar yang diharapkan.

Sebagai penutup, TKA hadir sebagai salah satu solusi dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mari kita bersama-sama bergotong-royong dalam upaya menghadirkan pendidikan yang mencerahkan dan menghasilkan anak-anak bangsa yang kompetitif.

Menghadapi Indonesia Emas Tahun 2045 harus dimulai dari sekarang dengan mempersiapkan generasi bangsa yang berilmu dan berdaya saing. Tanpa itu, maka bonus demografi akan menjadi bencana- bukan malah menjadi berkah.

Mari siapkan generasi bangsa saat ini menjadi generasi yang tangguh, berkarakter dan berilmu. Yakinlah Indonesia Emas tahun 2045 menjadi kebangkitan bangsa menuju ke arah yang lebih baik dan gemilang. Semoga!!

*Oleh: Amir Fiqi,*

*Guru SMA Muhammadiyah 4 Kota Tangerang*



**MENEGUHKAN KONEKTIVITAS DAN KEDAULATAN:**

# **PENETAPAN 36 BANDARA INTERNASIONAL DALAM BINGKAI ASTA CITA PRESIDEN**

**D**alam langkah strategis yang menggambarkan arah baru pembangunan nasional, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menetapkan 36 bandara umum sebagai bandara internasional. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan status administratif, melainkan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam misi memperkuat konektivitas nasional dan internasional, mendorong

pemerataan pembangunan, serta memperkuat kedaulatan negara di tengah dinamika global.

“Penetapan bandara internasional menjadi salah satu langkah nyata Kemenhub dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat konektivitas, mempercepat pembangunan ekonomi, dan memastikan kehadiran negara hingga ke pelosok Nusantara,” tegas Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers di

Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Langkah ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025, yang menetapkan bandara-bandara dari Aceh hingga Papua sebagai simpul baru dalam jaringan penerbangan internasional Indonesia. Di antaranya adalah Bandar Udara Sultan Iskandar Muda (Aceh), Jenderal Ahmad Yani (Semarang), Supadio (Pontianak), Syamsudin Noor (Banjarmasin), hingga Hang Nadim (Batam). Penambahan





ini hampir dua kali lipat dari jumlah bandara internasional sebelumnya, yang hanya berjumlah 17.

Menurut Dudy, kebijakan ini akan memberikan dampak positif yang luas. “Dengan status internasional, bandara di berbagai daerah akan menjadi simpul perdagangan, pariwisata, dan investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Rabu, (20/8/2025). Ia menambahkan bahwa konektivitas global yang lebih luas akan mempermudah pergerakan orang dan barang, serta menghubungkan daerah-daerah dengan pusat pertumbuhan dunia.

Namun, penetapan ini tidak dilakukan sembarangan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menjelaskan bahwa setiap bandara yang ditetapkan sebagai internasional wajib memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan sesuai ketentuan International

Civil Aviation Organization (ICAO). “Status internasional pada bandar udara membawa tanggung jawab yang tidak ringan,” kata Lukman dalam keterangan tertulis pada Selasa (12/8/20). Ia menekankan pentingnya kesiapan fasilitas imigrasi, kepabeanan, dan kekarantinaan sebelum bandara dapat melayani penerbangan langsung dari dan ke luar



**Dudy Purwagandhi**

negeri.

Kemenhub juga menetapkan mekanisme evaluasi berkala. Dalam dua tahun ke depan, status internasional akan ditinjau kembali berdasarkan traffic penumpang dan efektivitas operasional. “Jika memang kondisinya sangat sepi, bisa saja ada opsi ditutup status internasionalnya. Itu adalah bagian dari evaluasi,” ujar Dudy, Rabu (20/8/2025). Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak akan dilakukan sepihak, melainkan melibatkan pemerintah daerah, maskapai, dan kementerian terkait.

Di balik kebijakan ini, tersimpan ambisi besar untuk memperluas kehadiran negara dan memperkuat kedaulatan di wilayah-wilayah strategis. “Bandara internasional juga berfungsi strategis dalam mendukung pertahanan negara serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan geopolitik dan bencana,” ujar Dudy dalam forum kebijakan transportasi,

Selasa, (19/8/2025). Pernyataan ini mencerminkan bahwa bandara bukan hanya gerbang ekonomi, tetapi juga instrumen geopolitik dan simbol kehadiran negara.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menginstruksikan pembukaan bandara internasional sebanyak-banyaknya di berbagai daerah. “Presiden Prabowo menginginkan percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata daerah. Sehingga penetapan bandara internasional ini menjadi langkah strategis untuk mendorong hal tersebut,” kata Dudy dalam pernyataan pada Kamis, 14 Agustus 2025.

Di lapangan, sejumlah bandara yang baru ditetapkan telah mulai beroperasi melayani rute internasional. Bandar Udara S. M. Badaruddin II di Palembang, misalnya, kini melayani rute langsung ke Kuala Lumpur melalui maskapai AirAsia Berhad. Sementara itu, beberapa bandara lain seperti H.A.S. Hanandjoeddin di Belitung masih dalam tahap persiapan pembukaan rute internasional.

Kebijakan ini juga diharapkan memperkuat pemerataan pembangunan. “Kami ingin pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan juga menjangkau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua,” ujar Dudy dalam wawancara dengan media nasional beberapa waktu lalu. Dengan konektivitas yang lebih luas, daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi kini memiliki peluang lebih besar untuk terhubung dengan pasar global.

Namun, tantangan tetap ada. Beberapa pengamat menyoroti kesiapan infrastruktur dan potensi beban operasional yang meningkat. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku industri menyambut baik kebijakan ini



**Lukman F. Laisa**

sebagai peluang baru untuk ekspansi dan peningkatan daya saing. “Kami melihat ini sebagai momentum untuk memperluas jaringan dan membuka pasar baru,” ujar seorang eksekutif maskapai penerbangan dalam diskusi industri pada 21 Agustus 2025.

Penetapan 36 bandara internasional bukan hanya soal jumlah, melainkan soal arah pembangunan nasional. Dalam bingkai Asta Cita Presiden, kebijakan ini menjadi manifestasi dari cita-cita besar: Indonesia yang terhubung, berdaya saing, dan berdaulat. Seperti yang ditegaskan Dudy, “Langkah ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan Indonesia yang lebih terbuka dan inklusif.”

### **Respon Masyarakat**

Respon masyarakat terhadap penetapan 36 bandara sebagai bandara internasional oleh Kementerian Perhubungan pada Agustus 2025 menunjukkan spektrum harapan, antusiasme, dan juga kehati-hatian. Di berbagai daerah, kebijakan ini dipandang sebagai peluang besar untuk membuka akses ekonomi dan pariwisata, meski sebagian kalangan



juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan keberlanjutan operasionalnya.

Di Sumatera Barat, seorang pelaku usaha pariwisata di Bukittinggi menyambut baik penetapan Bandara Minangkabau sebagai bandara internasional. “Kami berharap ini bukan sekadar status, tapi benar-benar membuka jalur langsung dari luar negeri. Wisatawan Malaysia dan Singapura bisa langsung datang tanpa



**Mohammad R. Pahlevi**





transit di Jakarta,” ujarnya kepada media lokal, Kamis 21 Agustus 2025. Ia menambahkan bahwa pelaku UMKM dan pengelola homestay telah mulai bersiap menyambut potensi lonjakan wisatawan.

Sementara itu, di Kalimantan Timur, masyarakat menyambut penetapan Bandara APT Pranoto di Samarinda dengan harapan tinggi. “Selama ini kami harus ke Balikpapan dulu untuk penerbangan internasional. Kalau Samarinda bisa langsung ke luar negeri, itu akan sangat membantu,” kata seorang mahasiswa Universitas Mulawarman dalam wawancara komunitas pada 23 Agustus 2025. Namun, ia juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas dan layanan di bandara agar benar-benar layak menyandang status internasional.

Di sisi pengelola, Direktur Utama InJourney Airports, Mohammad R. Pahlevi, menyatakan bahwa penetapan 30 bandara di bawah pengelolaan mereka sebagai bandara internasional akan memperkuat peran bandara sebagai “agent of development dan value creator” dalam pemerataan layanan

penerbangan internasional. Ia optimistis bahwa kebijakan ini akan memberikan efek berganda terhadap sektor pariwisata, perdagangan, dan industri.

Namun, tidak semua tanggapan bernada optimis. Di Papua, beberapa tokoh masyarakat mempertanyakan apakah penetapan Bandara Mopah di Merauke dan Bandara Sentani di Jayapura sebagai bandara internasional akan diikuti dengan pembukaan rute langsung. “Kami khawatir ini hanya status di atas kertas. Kalau tidak ada maskapai yang membuka rute, masyarakat tidak akan merasakan manfaatnya,” ujar seorang aktivis transportasi lokal dalam diskusi daring, Rabu (20/8/2025).

Kementerian Perhubungan sendiri telah menegaskan bahwa status

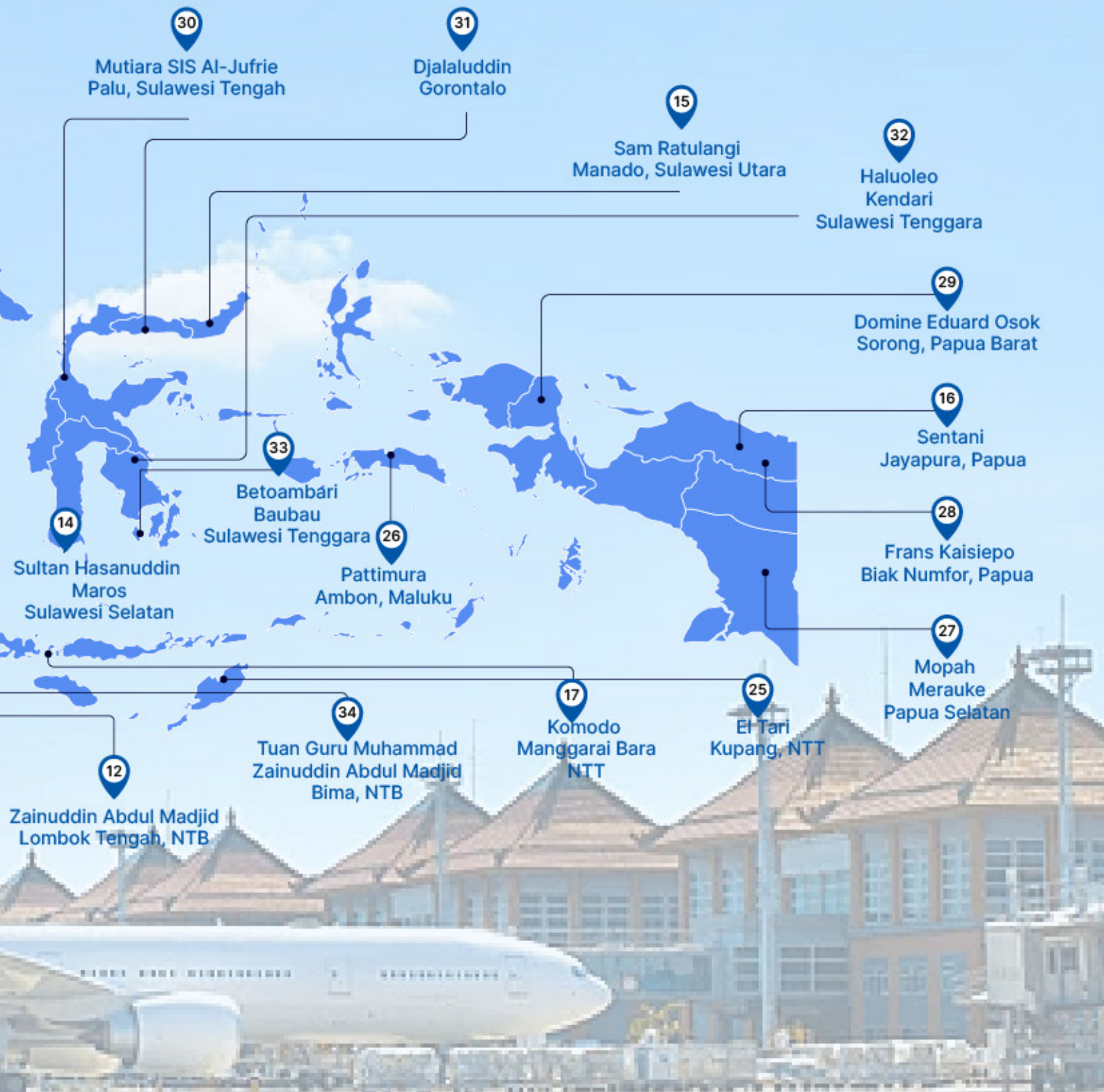
internasional akan dievaluasi dalam dua tahun. “Jika lalu lintasnya tidak memenuhi kriteria, status tersebut bisa dicabut,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Ia menambahkan bahwa evaluasi akan melibatkan pemerintah daerah, maskapai, dan instansi terkait, agar keputusan tetap berbasis kebutuhan dan keberlanjutan.

Secara umum, masyarakat di berbagai daerah melihat penetapan ini sebagai peluang untuk memperluas konektivitas dan mempercepat pembangunan. Namun, mereka juga berharap agar pemerintah tidak berhenti pada penetapan status, melainkan benar-benar memastikan kesiapan infrastruktur, layanan, dan komitmen maskapai untuk membuka rute internasional yang relevan dengan kebutuhan lokal.





# 36 bandara yang telah ditetapkan sebagai bandara internasional oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 20252:





## SORE: ISTRI DARI MASA DEPAN – CINTA, WAKTU, DAN PILIHAN YANG TAK BISA DIULANG

**D**irilis pada 10 Juli 2025, film *Sore: Istri dari Masa Depan* karya Yandy Laurens bukan sekadar kisah cinta, melainkan sebuah refleksi emosional tentang waktu, kehilangan, dan keberanian untuk berubah. Diadaptasi dari web series viral tahun 2017, versi layar lebar ini dibintangi oleh Sheila Dara Aisha sebagai Sore dan Dion Wiyoko sebagai Jonathan, pasangan yang terikat oleh takdir lintas waktu.

Film ini dibuka dengan adegan yang langsung menggugah rasa penasaran. Seorang perempuan muncul di kamar Jonathan dan berkata dengan tenang, “Hai, aku Sore. Istri kamu dari masa

depan.” Kalimat ini bukan hanya pembuka, tapi juga penanda bahwa kisah yang akan terjalin bukanlah cinta biasa.

Sheila Dara mengaku bahwa peran Sore memberinya ruang untuk mengeksplorasi emosi yang kompleks. “Sore bukan karakter yang datang untuk menyelamatkan, tapi untuk mengingatkan. Ia tahu bahwa waktu tidak bisa diulang, tapi cinta bisa memberi makna baru,” ujar Sheila dalam wawancara promosi film.

Dion Wiyoko, yang memerankan Jonathan, menyebut bahwa karakter yang ia mainkan adalah cerminan banyak pria modern yang terjebak



dalam rutinitas dan lupa merawat dirinya sendiri. “Jonathan itu keras kepala, tapi bukan karena dia jahat. Dia takut berubah. Dan Sore datang bukan untuk memaksanya, tapi untuk mencintainya sampai dia berani berubah,” kata Dion.

Konflik utama film ini bukan tentang perjalanan waktu, melainkan tentang dua orang yang mencoba saling memahami di tengah ketidakseimbangan emosi dan ekspektasi. Sore ingin menyelamatkan Jonathan dari gaya hidup yang akan membunuhnya. Jonathan merasa dikendalikan oleh seseorang yang bahkan belum ia kenal. “Kamu datang dari masa depan, tapi kamu nggak tahu rasanya hidup di masa sekarang,” kata Jonathan dalam satu adegan penuh amarah.

Namun seiring waktu, hubungan mereka berkembang. Sore mengajak Jonathan berolahraga, makan sehat, dan menulis jurnal.

Di Finlandia, Jonathan menulis: “Dalam senyap, beku bumi mengajak mereka datang untuk seolah bisa menghentikan waktu.” Kalimat itu menjadi simbol bahwa Jonathan mulai menerima kehadiran Sore bukan sebagai ancaman, tapi sebagai harapan.

Sinematografi film ini digarap oleh Dimas Bagus Triatma, dengan latar di Kroasia, Finlandia, dan Indonesia. Visual aurora borealis, lanskap bersalju, dan cahaya senja menjadi metafora dari perjalanan batin para tokoh. Musik dari Barasuara, terutama lagu “Terbuang Dalam Waktu,” menjadi crescendo emosional yang menyatu dengan klimaks cerita.

Menjelang akhir film, rahasia besar terungkap: Sore tahu bahwa ia tidak bisa tinggal selamanya. Ia datang hanya untuk memberi Jonathan kesempatan kedua. “Kalau kamu bisa



hidup lebih lama, aku rela kamu nggak ingat aku,” ucapnya sambil menatap langit senja. Dialog ini menjadi titik puncak emosional yang membuat banyak penonton terdiam.

Mathias Muchus tampil sebagai ayah Jonathan, menambah lapisan emosional dalam cerita. Ia berkata kepada putranya, “Kadang cinta itu bukan tentang siapa yang tinggal, tapi siapa yang berani pergi demi kamu tetap hidup.” Kalimat itu menjadi penutup yang menggugah, menegaskan bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan, bukan kepemilikan.

Sore: Istri dari Masa Depan bukan hanya sukses secara komersial—menembus 3 juta penonton dalam waktu sebulan—tetapi juga menjadi bahan diskusi publik tentang cinta, kesehatan mental, dan pilihan hidup. Film ini mengajak penonton untuk bertanya: jika kita bisa melihat masa depan, apakah kita akan berani mengubah masa kini?

Periode 1 Juni - 31 Desember 2025

# Pindah Payroll ke BNI Dapatkan Berbagai Benefit

Reward Cashback hingga  
**Rp500 Ribu**

**Special Rate**  
Fasilitas Pinjaman

Bonus hingga  
**100 Kupon Undian**  
rejek*i* **wondr** BNI

Cash Reward **1%**  
untuk Perusahaan



Dapatkan  
kesempatan mengikuti  
**rejek*i* wondr** BNI

Informasi Selengkapnya  
[bni.id/payroll](https://bni.id/payroll)